

**ANALISIS DAMPAK BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI
LAMPUNG : DENGAN METODE *INTERRUPTED TIME SERIES***

(Skripsi)

Oleh

M. IKHSAN NUR ROZAK

NPM 2211021141



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**ANALISIS DAMPAK BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI
LAMPUNG : DENGAN METODE *INTERRUPTED TIME SERIES***

Oleh
M. IKHSAN NUR ROZAK

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DAMPAK BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG : DENGAN METODE *INTERRUPTED TIME SERIES*

OLEH

M. IKHSAN NUR ROZAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah *Interrupted Time Series* (ITS) dengan pendekatan regresi *Ordinary Least Squares* (OLS) menggunakan data runtun waktu periode pengamatan sebanyak 24 observasi. Model penelitian memasukkan variabel intervensi bantuan sosial sebagai variabel utama, serta variabel kontrol berupa PDRB per kapita dan inflasi. Hasil estimasi menunjukkan variabel tren waktu berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang berarti tren tingkat kemiskinan sebelum intervensi bantuan sosial PKH diterapkan telah menunjukkan tren menurun. Variabel intervensi bantuan sosial PKH berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang berarti bantuan sosial PKH berdampak pada periode ketika kebijakan diterapkan. Namun, variabel tren waktu setelah intervensi tidak berpengaruh negatif signifikan, sehingga menunjukkan bahwa perubahan tren penurunan kemiskinan dalam jangka panjang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Variabel kontrol PDRB per kapita terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap penurunan kemiskinan, sedangkan inflasi tidak menunjukkan pengaruh positif signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan sosial PKH berperan dalam mengurangi kemiskinan, khususnya dalam jangka pendek, dengan PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, maka menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mendukung penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Interrupted Time Series, Kemiskinan, PDRB per Kapita, Program Keluarga Harapan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) SOCIAL ASSISTANCE ON POVERTY LEVELS IN LAMPUNG PROVINCE: USING THE INTERRUPTED TIME SERIES METHOD

BY

M. IKHSAN NUR ROZAK

This study aims to analyze the impact of social assistance programs on poverty levels in Lampung Province. The method used is Interrupted Time Series (ITS) with an Ordinary Least Squares (OLS) regression approach using time series data of 24 observation periods. The research model includes the social assistance intervention variable as the main variable, as well as control variables in the form of GRDP per capita and inflation. The estimation results show that the time trend variable has a significant negative effect on the poverty level, meaning that the trend of the poverty level before the PKH social assistance intervention was implemented had shown a downward trend. The PKH social assistance intervention variable has a significant negative effect on the poverty level, meaning that PKH social assistance had an impact during the period when the policy was implemented. However, the time trend variable after the intervention did not have a significant negative effect, thus indicating that changes in the long-term trend of poverty reduction did not experience significant changes. The control variable GRDP per capita was shown to have a significant negative effect on poverty reduction, while inflation did not show a significant positive effect. These findings indicate that PKH social assistance plays a role in reducing poverty, especially in the short term, with GRDP per capita having a negative and significant effect on the poverty level, thus emphasizing the importance of economic growth in supporting sustainable poverty reduction.

Keywords: Social Assistance, Interrupted Time Series, Poverty, GRDP per Capita, Family Hope Program.

Judul Skripsi

: ANALISIS DAMPAK BANTUAN SOSIAL
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI
PROVINSI LAMPUNG : DENGAN METODE
INTERRUPTED TIME SERIES

Nama Mahasiswa

: *M. Ikhsan Nur Rozak*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2211021141

Program Studi

: Ekonomi Pembangunan

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



Dr. Asih Murwati, S.E., M.E.

NIP 19740410 200812 2 001

MENGETAHUI

2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

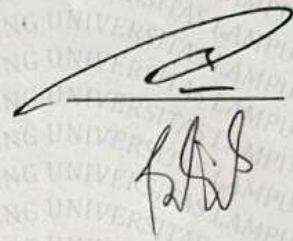
Dr. Arivina Ratih Y.T. S.E., M.M.

NIP 19800705 200604 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.



Penguji I : Dr. Arivina Ratih Y.T. S.E., M.M.



Penguji II : Zulfa Emalia, S.E., M.Sc.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 April 2026

PERTANYAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli yang saya susun dengan penuh tanggung jawab dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Jika di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 April 2026

Penulis



M. Ikhsan Nur Rozak

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Ikhsan Nur Rozak, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 24 Juli 2002. Penulis merupakan anak laki-laki terakhir dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Nyanyang dan Ibu Aisyah. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Sumur Putri Kota Bandar Lampung pada tahun (2009-2015). Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTS Swasta Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Lampung pada tahun (2015-2018). hingga melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Swasta Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Lampung pada tahun (2018-2021). Pada Tahun 2021, Penulis sempat menjadi tenaga pengajar di MTS Swasta Mangkunegara hingga akhir tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Selama menjalani perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, khususnya pada Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) dan UKM-F Economic & Bussiness Entrepreneur Club (EBEC).

Pada tahun 2024, penulis mengikuti magang bersertifikat Universitas Lampung di Bappeda Provinsi Lampung selama 4 bulan. Pada tahun 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Universitas Lampung di Desa Sukawaringin, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah selama kurang lebih 40 hari. Serta mengikuti magang di Kanwil Bank Indonesia Provinsi Lampung sebagai Surveyor Pemantauan Harga di Kota Bandar Lampung. Selain itu, penulis juga aktif dalam mengikuti penelitian pengabdian bersama dosen yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

MOTTO

“وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ”

“Dan Allah adalah sebaik-baiknya perencana.”

-QS. Ali-Imran, 3 : 54

“خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ”

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (orang lain).”

-HR. Ahmad dan Thabrani

”Ilmu adalah harta yang tidak akan pernah habis, dan sukses adalah buah yang tumbuh darinya (Ilmu)”

-Ali bin Abi Tholib

“Doa orang tuaku adalah senjata terampuh untuk mengubah takdirku menjadi lebih baik”

-M. Ikhsan Nur Rozak

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan, karya ini penulis persembahkan

kepada:

Kedua Orang Tuaku

Nyanyang Saifullah

Aisyah

Terima kasih atas dukungan, pengorbanan, kesabaran, kasih sayang, serta doa tanpa henti yang menjadi kekuatan dalam setiap langkah kehidupanku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan umur, dan kebahagiaan kepada Ibu dan Bapak.

Kedua Kakakku

Syarifatul Anwaria

Yuli Safitri

Terima kasih atas dukungan, pengorbanan, kesabaran, dan doa yang menjadi pendukung hingga dititik ini.

Serta

Almameter Tercinta

Universitas Lampung

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi berjudul “*Analisis Dampak Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung : dengan Metode Interrupted Time Series*” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan, namun berbagai pengalaman dan pembelajaran berharga dapat diperoleh melalui proses yang dilalui. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembahas dan Penguji. Terima kasih atas arahan, masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun. Masukan yang diberikan sangat membantu penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun. Masukan yang diberikan sangat membantu penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Vitriyani Tri Purwaningsih, S.Si., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis sejak awal perkuliahan sekaligus Dosen Pembahas, yang

senantiasa membimbing dengan sangat baik, memberikan perhatian, masukan, nasihat, saran, ilmu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.

5. Ibu Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing dengan sangat baik, memberikan perhatian, nasihat, saran, ilmu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga ibu senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.
6. Bapak Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembahas, atas arahan, masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun. Masukan yang diberikan sangat membantu penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah membagikan ilmu pengetahuan, wawasan selama masa perkuliahan, menjadi bekal yang sangat berharga dalam menempuh perjalanan akademik maupun pengembangan diri ke depannya.
8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
9. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Nyanyang Saifullah dan Ibu Aisyah, atas doa yang tiada henti, kasih sayang, kesabaran, serta dukungan yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan penulis. Seluruh perhatian dan pengorbanan yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi utama dalam menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan bagi Bapak dan Ibu.
10. Kepada kedua kakakku, Syarifatul Anwaria dan Yuli Safitri, atas doa, dukungan dan kehadiran yang selalu menjadi pendukung dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada seluruh keluarga besar, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, perhatian, dan dukungan yang senantiasa diberikan.
12. Kepada teman-teman “Keluarga Bahagia” yang penulis temukan selama masa perkuliahan, Rayhan, Sukma, Doni, Endriko, Irfan, Intan, Nadya, dan Yopa, atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang senantiasa diberikan.

13. Kepada teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2022, yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan yang terjalin selama masa perkuliahan.
14. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), Bima, Tirta, Filda, Santi, Adel, Nadiya di Desa Sukawaringin, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah. atas kerja sama, kebersamaan, serta pengalaman berharga yang telah dilalui bersama selama kegiatan KKN berlangsung.
15. Kepada Kak Gwen Adhitya Amalkhan, selaku pihak dari Kanwil DJPB Provinsi Lampung dan kepada Ibu Nugraheni Amilla Sari, S.Sos., selaku pihak dari Dinas Sosial Provinsi Lampung. Terima kasih banyak atas kesediaan dalam memberikan data dan informasi dalam proses penyusunan skripsi. Bantuan dan arahan yang diberikan sangat membantu hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
16. Kepada diri penulis sendiri yang telah berjuang dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan hingga mampu menyelesaikan tahap ini. Perjalanan ini menjadi pelajaran berharga bahwa setiap proses, sekecil apa pun usaha yang dilakukan, memiliki makna dan pada akhirnya mengantarkan penulis pada pencapaian ini.
17. Akhir kata, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta doa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 28 April 2026

Penulis

M. Ikhsan Nur Rozak

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Teoritis	16
2.1.1 Teori Kemiskinan dan Intervensi Bantuan Sosial	16
2.1.2 Kemiskinan.....	22
2.1.3 Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	28
2.1.4 Metode Interrupted Time Series	40
2.1.5 Variabel Kontrol	42
2.2 Penelitian Terdahulu	45
2.3 Kerangka Pemikiran.....	50
2.4 Rumusan Hipotesis	52
III. METODOLOGI PENELITIAN	54
3.1 Jenis, Pendekatan, Waktu dan Tempat Penelitian	54
3.2 Teknik, Deskripsi dan Sumber Data	56
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	57
3.3.1 Tingkat Kemiskinan	57
3.3.2 Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	58
3.3.3 Variabel Intervensi	59
3.3.4 Variabel Kontrol (Z_1): PDRB Riil per Kapita	60

3.3.5 Variabel Kontrol (Z_2): Inflasi	61
3.4 Metode Analisis Data.....	61
3.4.1 Pengolahan Awal Data Time Series ITS	62
3.4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	62
3.4.3 Analisis Model Interrupted Time Series.....	62
3.4.4 Estimasi Model Regresi ITS.....	63
3.4.5 Uji Asumsi Klasik	65
3.4.6 Uji Hipotesis	67
3.4.7 Interpretasi Hasil	71
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	72
4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	72
4.1.1 Statistik Deskriptif Umum Variabel Penelitian	72
4.1.2 Statistik Deskriptif Sebelum dan Sesudah Intervensi.....	74
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	75
4.2.1 Uji Normalitas	75
4.2.2 Uji Autokorelasi	76
4.2.3 Uji Multikolinearitas	77
4.2.4 Uji Heteroskedastisitas	78
4.3 Hasil Estimasi Model Interrupted Time Series.....	79
4.4 Uji Hipotesis	81
4.4.1 Uji Parsial (Uji t)	82
4.4.2 Uji Bersama-sama (Uji F)	82
4.4.3 Uji Koefisien Determinan (R^2).....	83
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	83
4.5.1 Tren Kemiskinan Sebelum Intervensi	83
4.5.2 Dampak Intervensi PKH terhadap Kemiskinan Ketika Adanya Intervensi	84
4.5.3 Tren Kemiskinan Setelah Intervensi dengan Mengontrol Variabel Ekonomi	85
4.5.4 Pengaruh Variabel Kontrol PDRB per Kapita terhadap Tingkat Kemiskinan.....	87
4.5.5 Pengaruh Variabel Kontrol Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan	88
4.5.6 Implikasi Hasil Penelitian.....	89
V. KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Kesimpulan	91

5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Data Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2001-2024.....	4
Gambar 1.2 Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial PKH dari APBN Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Provinsi Lampung.....	6
Gambar 1.3 Jumlah KPM Bantuan Sosial PKH di Provinsi Lampung Tahun 2011- 2024.....	7
Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan Sisi Permintaan (Kiri) dan Penawaran (Kanan).....	20
Gambar 2.2 Mekanisme Pelaksanaan PKH.....	35
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	52
Gambar 4.1 Grafik Hasil Estimasi Model Interrupted Time Series.....	80
Gambar 4.2 Grafik Perbandingan Tren Sebelum dan Sesudah Intervensi.....	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Indeks Bantuan Sosial yang diterima KPM PKH	40
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	46
Tabel 3.1 Deskripsi Variabel	57
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Umum Variabel Penelitian	72
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Sebelum dan Sesudah Intervensi	74
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	75
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	76
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas Model Lengkap	77
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Kontrol	78
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	79
Tabel 4.8 Hasil Estimasi Model Interrupted Time Series	79
Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji t)	82
Tabel 4.10 Hasil Uji Bersama-sama (Uji F).....	82
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien determinan (R^2)	83

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan struktural yang kompleks dan multidimensional, mencerminkan tidak hanya ketimpangan distribusi pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Kemiskinan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Pertama, kemiskinan absolut, yaitu kondisi ketika pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kedua, kemiskinan relatif, yang muncul akibat ketidakmerataan distribusi hasil kebijakan pembangunan. Ketiga, kemiskinan kultural, yang dipengaruhi oleh pola pikir, nilai, kebiasaan, atau etos kerja masyarakat. Terakhir, kemiskinan struktural, yaitu kondisi yang terjadi karena faktor-faktor struktural dalam masyarakat yang membatasi akses individu atau kelompok terhadap sumber daya (Khomsan *et al.*, 2015).

Di Indonesia, meskipun terdapat penurunan angka kemiskinan dari 11,66% pada September 2012 menjadi 8,57% pada September 2024, laju penurunan tersebut relatif lambat, hanya sekitar 3,09% dalam kurun waktu lebih dari satu dekade (Badan Pusat Statistik, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan membutuhkan instrumen yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong perubahan kesejahteraan secara berkelanjutan. Salah satu instrumen kebijakan utama yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama untuk mengatasi kemiskinan. PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga bantuan diarahkan kepada mereka yang benar-benar berada

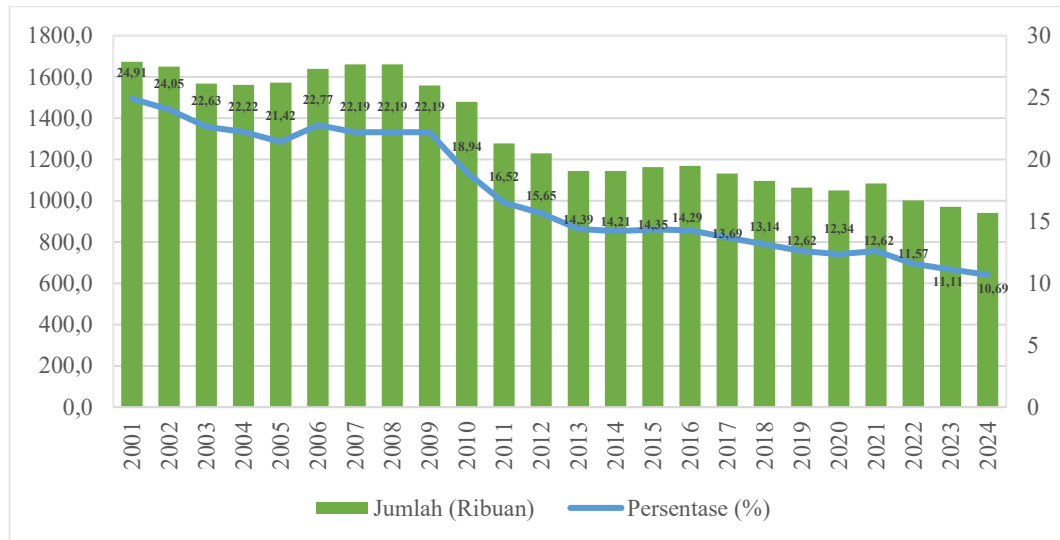
di bawah garis kemiskinan. Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran, serta mendorong kemandirian keluarga miskin dalam jangka panjang melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). Dengan demikian, sasaran bantuan sosial PKH secara eksplisit ditujukan kepada rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin menurut data resmi, yaitu mereka yang berada di bawah garis kemiskinan yang diukur oleh BPS melalui indikator Headcount Index (P0), yaitu persentase penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan nasional (Badan Pusat Statistik, 2025a). Keterkaitan ini menjadikan PKH sebagai fokus utama dalam penelitian ini untuk memahami kontribusi kebijakan terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Lampung. Program ini pertama kali diluncurkan secara nasional pada tahun 2007 sebagai pemulaan di tujuh provinsi, dan kemudian diperluas secara bertahap, yang merupakan bentuk pelaksanaan peran negara dalam membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Kebijakan ini bermula dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara berkeadilan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019; Undang-Undang Republik Indonesia, 2004). PKH dirancang sebagai bantuan sosial bersyarat untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan guna memutus rantai kemiskinan antargenerasi dalam kerangka tersebut.

Penguatan arah kebijakan PKH tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memprioritaskan kelompok fakir miskin sebagai sasaran utama kebijakan publik (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009, 2011). Implementasi dan tata kelola PKH kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, yang memperkuat mekanisme penargetan, penyaluran, dan kewajiban penerima manfaat sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, 2018).

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang relatif tinggi, sehingga salah satu provinsi yang relevan untuk ditelaah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada September 2024 persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 10,62 persen atau setara dengan sekitar 939,30 ribu jiwa di atas rata-rata nasional yang berada di 8,57 persen, menempatkan Lampung pada urutan ke-16 dari 38 provinsi di Indonesia dan keempat tertinggi di Pulau Sumatera setelah Aceh, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. yang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan sosial secara lokal (Badan Pusat Statistik, 2024).

Kemiskinan tetap menjadi tantangan struktural di Provinsi Lampung, meskipun berbagai program bantuan sosial telah diimplementasikan dengan program utamanya Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai dilaksanakan pada tahun 2011 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Keputusan Gubernur No. 82 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung Tahun 2011 (Jdih.lampungprov, 2011; Undang-Undang Republik Indonesia, 2011). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Lampung mencapai 941,23 ribu orang, menurun sebanyak 29,4 ribu orang dibandingkan Maret 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Namun, penurunan ini tidak merata jumlah penduduk miskin di perkotaan justru mengalami peningkatan sebanyak 11,1 ribu orang, sementara di pedesaan menurun 40,5 ribu orang. Peningkatan kemiskinan di perkotaan menunjukkan adanya tantangan dalam penyaluran dan efektivitas program bantuan sosial di wilayah urban (Badan Pusat Statistik, 2024).

Berikut data kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung dari tahun 2001-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025. (Data diolah)

Gambar 1.1 Data Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2001-2024.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung selama periode 2001–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro serta implementasi berbagai kebijakan publik. Pada awal periode observasi, angka kemiskinan masih tergolong tinggi sebagai konsekuensi dari proses pemulihan ekonomi pascakrisis nasional yang mulai stabil jika dibandingkan tahun sebelumnya walau belum sepenuhnya stabil dalam segi kondisi ekonomi. Pada tahun 2001, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung tercatat sebesar 24,91 persen atau sekitar 1,67 juta jiwa. Kondisi tersebut mencerminkan masih lemahnya daya beli masyarakat, keterbatasan kesempatan kerja, serta belum optimalnya sistem perlindungan sosial yang terintegrasi pada awal dekade 2000-an.

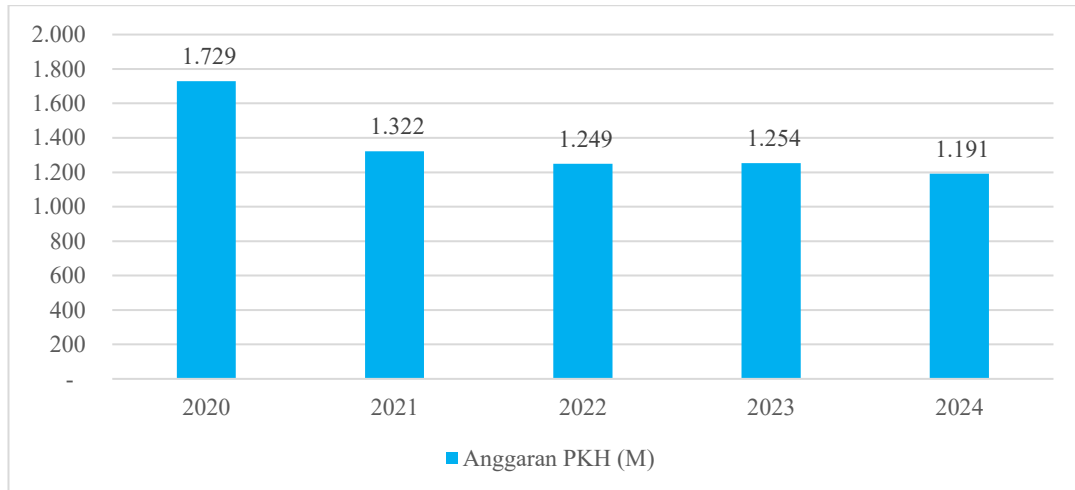
Memasuki periode 2001-2004, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung mulai menunjukkan tren penurunan secara bertahap seiring dengan pemulihan ekonomi nasional pascakrisis. Persentase penduduk miskin menurun dari 24,91 persen pada tahun 2001 menjadi 22,22 persen pada tahun 2004. Meskipun tren penurunan mulai

terlihat, tingkat kemiskinan pada periode ini masih tergolong tinggi, yang mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin. Pada fase ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan masih relatif terbatas dan belum terintegrasi dalam satu sistem perlindungan sosial yang komprehensif.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2005-2014, menunjukkan penurunan yang relatif lebih konsisten, meskipun masih disertai fluktuasi. Persentase penduduk miskin menurun dari 21,42 persen pada tahun 2005 menjadi 14,21 persen pada tahun 2014. Penurunan ini sejalan dengan meningkatnya peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui berbagai program bantuan sosial, termasuk mulai diterapkannya Program Keluarga Harapan secara nasional sejak tahun 2007 dan penguatan kerangka perlindungan sosial yang lebih terekspansi semenjak tahun 2011. Penurunan kemiskinan pada periode ini mengindikasikan adanya perbaikan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya, pada periode 2015-2024, penurunan tingkat kemiskinan masih berlanjut namun dengan laju yang lebih lambat. Persentase kemiskinan turun dari 14,35 persen pada tahun 2015 menjadi 10,69 persen pada tahun 2024. Perlambatan laju penurunan ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan memasuki fase yang lebih kompleks, di mana kelompok miskin yang tersisa cenderung berada dalam kondisi kemiskinan struktural dan menghadapi keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi. Selain itu, guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada periode 2020–2021 turut memengaruhi stabilitas tren penurunan kemiskinan, yang tercermin dari meningkatnya kembali persentase penduduk miskin pada tahun 2021 sebelum kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, tren kemiskinan di Provinsi Lampung selama periode 2001-2024 menunjukkan pola penurunan jangka panjang pascakrisis dan kemudian melambat dalam satu dekade terakhir. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah bantuan sosial Program Bantuan Sosial (PKH) berdampak terhadap tingkat kemiskinan, semenjak diterapkannya di Provinsi Lampung selama ini, juga dalam mempertahankan tren penurunan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyalurkan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) ke daerah-daerah, termasuk Provinsi Lampung, sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan. Berikut adalah data realisasi anggaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan dari APBN pemerintah pusat untuk wilayah Provinsi Lampung tahunan dari tahun 2020-2024 di Provinsi Lampung:

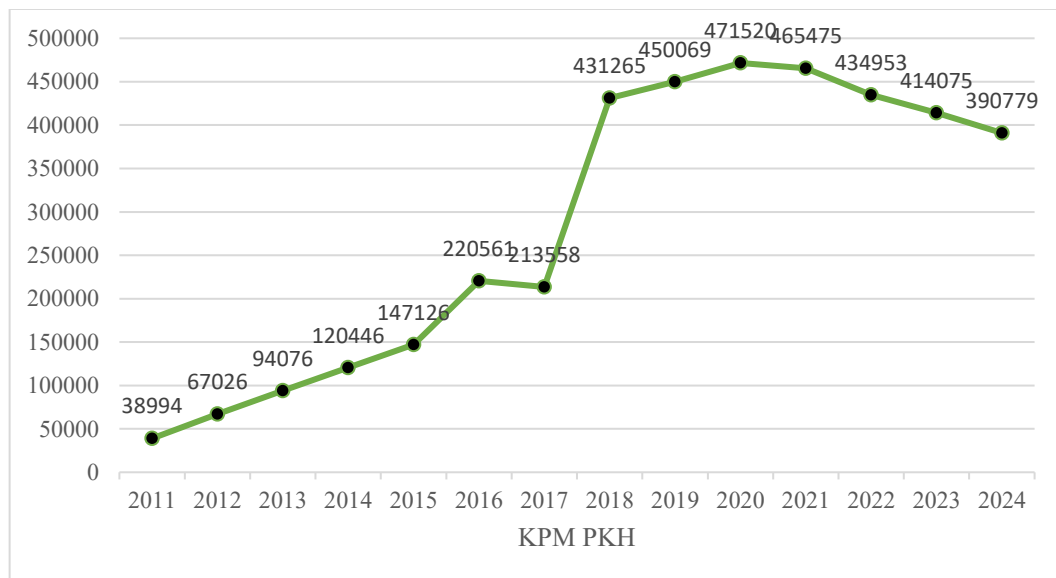


Sumber : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024 (Data diolah)

Gambar 1.2 Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial PKH dari APBN Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Provinsi Lampung.

Anggaran bantuan sosial PKH meskipun bersumber dari APBN, alokasi anggaran PKH ditetapkan secara spesifik per wilayah berdasarkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tingkat kemiskinan daerah, serta hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan demikian, anggaran PKH yang diterima Provinsi Lampung mencerminkan intensitas intervensi kebijakan perlindungan sosial pemerintah pusat di wilayah tersebut. Anggaran bantuan sosial PKH merepresentasikan bentuk intervensi kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan melindungi kelompok masyarakat rentan dan mendukung akses terhadap kebutuhan dasar (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Berdasarkan data anggaran PKH Provinsi Lampung periode 2020–2024, terlihat adanya dinamika alokasi anggaran yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, anggaran PKH Lampung mencapai Rp1,73 triliun, yang merupakan

respons pemerintah terhadap meningkatnya kerentanan sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, anggaran tersebut menurun menjadi Rp1,32 triliun, seiring dengan penyesuaian kebijakan fiskal dan evaluasi ulang terhadap cakupan penerima manfaat. Selanjutnya, pada tahun 2022 dan 2023, anggaran PKH Lampung relatif stabil di kisaran Rp1,25 triliun, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp1,19 triliun. Pola ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran PKH di Lampung bersifat adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi dan kebijakan nasional yang berlaku. Intensitas intervensi Program Keluarga Harapan di Provinsi Lampung dapat dianalisis melalui perkembangan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari waktu ke waktu. Perubahan jumlah KPM mencerminkan kebijakan perluasan cakupan, penyesuaian target, serta hasil evaluasi penyaluran program yang berpotensi memengaruhi dinamika tingkat kemiskinan di daerah. Perkembangan jumlah KPM PKH di Provinsi Lampung selama periode 2011-2024 disajikan pada Gambar berikut:



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2024

Gambar 1.3 Jumlah KPM Bantuan Sosial PKH di Provinsi Lampung Tahun 2011-2024.

Seiring dengan dinamika anggaran PKH di Provinsi Lampung, perkembangan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga menunjukkan pola yang penting untuk dicermati dalam konteks penurunan kemiskinan. Berdasarkan data pada

Gambar 1.3 jumlah KPM bantuan sosial PKH di Provinsi Lampung periode 2011-2024 memperlihatkan adanya ekspansi program yang cukup signifikan, terutama pada fase awal implementasi menyeluruh PKH di daerah. Pada tahun 2011, jumlah KPM PKH di Lampung tercatat sebanyak 38.994 keluarga, kemudian meningkat tajam menjadi 120.446 KPM pada tahun 2014. Peningkatan ini mencerminkan fase perluasan cakupan program sebagai instrumen perlindungan sosial utama bagi rumah tangga miskin dan rentan pasca penerapan nasional PKH secara penuh, termasuk di Provinsi Lampung.

Perluasan KPM PKH semakin intensif pada periode 2015-2019. Jumlah penerima meningkat dari 147.126 KPM pada tahun 2015 menjadi 450.069 KPM pada tahun 2019. Lonjakan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang memperkuat program bantuan sosial bersyarat sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, sekaligus penyempurnaan sistem pendataan melalui DTKS. Peningkatan jumlah KPM tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjangkau rumah tangga miskin di wilayah perdesaan dan sektor informal yang selama ini rentan terhadap guncangan ekonomi. Puncak jumlah KPM PKH di Provinsi Lampung terjadi pada periode 2020-2021, yaitu masing-masing sebesar 471.520 dan 465.475 KPM. Kondisi ini berkaitan erat dengan pandemi COVID-19 yang meningkatkan risiko kemiskinan dan kerentanan sosial, sehingga pemerintah memperluas cakupan bantuan sosial, termasuk PKH, guna menahan lonjakan angka kemiskinan. Dalam situasi krisis, PKH berfungsi sebagai *shock absorber* bagi rumah tangga miskin melalui dukungan pendapatan bersyarat yang ditujukan untuk menjaga akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dasar (World Bank, 2020a).

Namun demikian, setelah tahun 2021 terlihat adanya tren penurunan jumlah KPM PKH di Provinsi Lampung, dari 434.953 KPM pada 2022 menjadi 390.779 KPM pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan melalui graduasi penerima manfaat, pembaruan DTKS, serta penguatan prinsip ketepatan sasaran. Secara normatif, penurunan jumlah KPM dapat diartikan sebagai indikasi membaiknya kondisi kesejahteraan sebagian rumah tangga penerima. Dinamika jumlah KPM PKH di Provinsi Lampung tidak hanya mencerminkan besaran

intervensi kebijakan bantuan sosial, tetapi juga menunjukkan perubahan strategi pemerintah dalam mengelola kemiskinan dari waktu ke waktu. Fluktuasi jumlah KPM yang cukup tajam, baik pada fase ekspansi maupun kontraksi, menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan berbasis waktu. Meskipun Program Keluarga Harapan telah menjadi instrumen utama kebijakan perlindungan sosial di Indonesia dengan cakupan penerima yang luas dan dukungan anggaran yang besar, efektivitas program ini dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan masih memerlukan pengujian empiris yang lebih mendalam. Intensitas intervensi PKH di Provinsi Lampung tercermin dari dinamika jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mengalami peningkatan signifikan sejak program ini diterapkan secara menyeluruh pada tahun 2011, diikuti dengan penyesuaian jumlah penerima pada periode-periode berikutnya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa PKH bukan sekadar kebijakan statis, melainkan intervensi yang terus disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan kebijakan penargetan pemerintah. Namun, intervensi bantuan sosial tidak secara otomatis menjamin tercapainya penurunan kemiskinan yang konsisten dan merata. Perkembangan kemiskinan di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin cenderung menurun secara agregat, laju penurunannya melambat dalam satu dekade terakhir dan memperlihatkan perbedaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi PKH perlu dianalisis tidak hanya dari sisi besaran anggaran dan jumlah penerima, tetapi juga dari dampaknya terhadap perubahan tingkat dan tren kemiskinan dalam jangka panjang.

Fenomena-fenomena di atas memperkuat kebutuhan akan analisis dampak berbasis data longitudinal. Dengan pendekatan ini, bantuan sosial PKH sebagai instrumen kebijakan pemerintah yang merepresentasikan sebagai bentuk intervensi pemerintah dengan tujuan berdampak terhadap tren kemiskinan di Provinsi Lampung. data realisasi anggaran bantuan sosial PKH dan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tersebut digunakan sebagai bukti intervensi pemerintah sebagai bentuk kebijakan fiskal daerah untuk mengurangi kemiskinan.

Penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan studi literatur dan cross-sectional atau data panel antarwilayah yang hanya menangkap gambaran sesaat, dan cenderung meneliti skema program bantuan sosial tertentu sehingga tidak mampu, mendeteksi dinamika jangka panjang. Seperti penelitian terdahulu Studi oleh Fadhli dan Nazila menunjukkan bahwa PKH memiliki pengaruh positif di kabupaten Jombang tepatnya di desa pucangsimo. Secara keseluruhan, program tersebut hanya menjelaskan 53,3% dari variabel penanggulangan kemiskinan, menunjukkan bahwa faktor lain juga berperan signifikan (Fadhli & Nazila, 2023b). Selain itu, penelitian oleh Mursyidah (2023) mengenai efektivitas program bantuan tunai bersyarat di Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa setelah dua tahun pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), tidak terdapat perbedaan signifikan dalam status gizi balita dan kesejahteraan keluarga, mengindikasikan bahwa program tersebut belum efektif dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan (Mursyidah, 2023). Sedangkan pada studi lainnya diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya peningkatan dalam pelaksanaan dan cakupan program PKH berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo (Friska Olabu *et al.*, 2024).

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bantuan sosial seringkali tidak disertai dengan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga penerima bantuan tetap bergantung pada bantuan pemerintah (Halawa, 2023). Calundu dan Musdalifa menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam penanganan kemiskinan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat prasejahtera (Calundu & Musdalifa, 2023). Lebih lanjut, studi oleh Salsabila *et al.* menemukan bahwa bantuan sosial belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia, terutama karena masalah dalam penargetan dan distribusi bantuan (Salsabila *et al.*, 2024b).

Kesenjangan dalam penelitian sebelumnya menunjukkan perlunya studi kuantitatif jangka panjang yang mampu menangkap dinamika kemiskinan secara lebih komprehensif. Sebagian besar kajian terdahulu masih terbatas pada analisis jangka pendek atau menggunakan pendekatan potong lintang dan panel yang belum

sepenuhnya merefleksikan perubahan struktural kemiskinan sebelum dan sesudah intervensi kebijakan. Akibatnya, dampak Program Keluarga Harapan sering kali dinilai secara parsial dan belum mampu menjelaskan kontribusi program tersebut terhadap perubahan tren kemiskinan dalam jangka panjang. Selain itu, efektivitas dampak PKH dalam mengurangi kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor ekonomi makro yang turut membentuk kondisi kesejahteraan masyarakat. Variabel seperti pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin melalui PDRB per kapita dan stabilitas harga yang diwakili oleh tingkat inflasi memiliki peran penting dalam menentukan daya beli dan tingkat kerentanan rumah tangga miskin. Tanpa mengendalikan faktor-faktor tersebut, analisis dampak PKH berpotensi menghasilkan estimasi yang bias dan kurang akurat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian kuantitatif jangka panjang yang secara eksplisit mengontrol pengaruh variabel ekonomi lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai efektivitas PKH. Pendekatan semacam ini memungkinkan pemisahan dampak kebijakan bantuan sosial dari dinamika ekonomi yang terjadi secara bersamaan, sehingga dapat memberikan bukti empiris yang lebih kuat mengenai peran PKH dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah dengan menganalisis dampak bantuan sosial PKH dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Lampung menggunakan model *Interrupted Time Series* (ITS). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan regresi data panel atau *cross-section*, model ITS secara spesifik dirancang untuk mengevaluasi dampak suatu intervensi (dalam hal ini, kebijakan bantuan sosial PKH) terhadap suatu hasil (tingkat kemiskinan) dengan membandingkan data sebelum dan sesudah intervensi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengukur perubahan tren dan level kemiskinan yang secara langsung dapat dikaitkan dengan kebijakan bantuan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih kuat mengenai analisis dampak bantuan sosial dan berkontribusi pada perbaikan kebijakan pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung.

Model *Interrupted Time Series* (ITS) merupakan metode analisis kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak intervensi kebijakan atau program

secara lebih akurat, seperti pada penelitian terdahulu oleh Jiang *et al.*, (2024), yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan kesehatan ketika uji coba terkontrol secara acak tidak memungkinkan, karena ITS mampu menangkap perubahan tingkat (level) maupun tren suatu indikator sebelum dan sesudah intervensi kebijakan diterapkan secara populasi, namun efektivitas analisis tersebut sangat bergantung pada pemilihan model estimasi yang tepat serta ketepatan dalam menspesifikasikan bentuk dampak kebijakan. Dan pada penelitian oleh Ilboudo & Siri, (2023), kebijakan penghapusan biaya layanan kesehatan bagi ibu dan anak di Burkina Faso memberikan bukti empiris yang kuat bahwa penghilangan hambatan finansial di titik layanan secara nyata mampu meningkatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan dan memperbaiki hasil kesehatan, terutama pada kelompok anak di bawah lima tahun.

Menggunakan pendekatan *Interrupted Time Series* berbasis data nasional jangka panjang, penulis menemukan bahwa kebijakan layanan kesehatan gratis secara signifikan meningkatkan kunjungan pelayanan kesehatan anak dan menurunkan angka kematian akibat malaria berat pada anak, meskipun dampaknya terhadap beberapa indikator lain seperti persalinan berbantuan dan kematian bayi di rumah sakit belum sepenuhnya signifikan secara statistik. Lalu pada penelitian lainnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2013, yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menurunkan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung (Sujoko *et al.*, 2022). Metode ini juga telah digunakan dalam berbagai studi untuk mengevaluasi dampak kebijakan publik, termasuk dalam konteks pandemi COVID-19, seperti penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menganalisis dampak dari Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 di Kabupaten Nganjuk terhadap angka penularan dan kematian akibat COVID-19. Peraturan ini menjadi menarik karena berbeda dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan di banyak daerah lain. Dengan menggunakan analisis ITS, peneliti ini membandingkan tren kasus dan kematian sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa Peraturan Bupati tersebut berpengaruh signifikan dalam menurunkan angka kematian (Case Fatality Rate atau CFR) tetapi gagal mengurangi angka penularan COVID-19 (Prasiska & Yoon, 2021).

Kebijakan yang dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu kebijakan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menganalisis data sebelum dan sesudah pelaksanaan program bantuan sosial, ITS dapat mengidentifikasi perubahan tren dan tingkat kemiskinan yang disebabkan oleh intervensi tersebut. Skema penelitian ini menggunakan data time series tahunan dari periode tahun 2001 sebagai tahun stabilitas ekonomi pasca pemulihan pascakrisis hingga tahun 2024, dengan menetapkan tahun 2011 sebagai titik intervensi yang menandai awal implementasi lebih terstruktur dan intensif dari program bantuan sosial PKH berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Keputusan Gubernur No. 82 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung Tahun 2011, dibuktikan juga oleh pernyataan resmi Dinas Sosial bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Lampung dimulai sejak tahun 2011 (Ppid.lampungprov.go.id, 2023). Melalui pendekatan *Interrupted Time Series (ITS)*, penelitian ini dirancang untuk mendeteksi apakah bantu sosial PKH memicu penurunan langsung (*level change*) maupun memengaruhi arah tren jangka panjang (*slope change*) kemiskinan secara signifikan di Provinsi Lampung, baik sebelum maupun sesudah intervensi kebijakan bantuan sosial PKH dengan mempertimbangkan dinamika waktu yang lebih luas dengan memanfaatkan keseluruhan data time series. Penelitian akan mengontrol beberapa variabel ekonomi makro yang relevan sebagai variabel kontrol, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita untuk menggambarkan kapasitas ekonomi daerah, tingkat inflasi sebagai indikator stabilitas harga yang memengaruhi daya beli masyarakat miskin. Pengendalian variabel-variabel ini bertujuan untuk menghasilkan estimasi dampak program bantuan sosial PKH yang lebih akurat dan robust, dengan meminimalkan bias akibat faktor ekonomi lainnya.

Dengan desain tersebut, studi ini diharapkan mampu menyajikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai dampak bantuan sosial PKH dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Lampung. Penerapan metode *Interrupted Time Series (ITS)* memungkinkan peneliti untuk mengamati pola perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, termasuk kecenderungan yang mungkin tidak dapat terdeteksi melalui analisis *cross-sectional* yang bersifat sederhana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

berkontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan sosial dan ekonomi, serta dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam merancang kebijakan bantuan sosial yang efektif dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi secara akademik, tetapi juga memiliki kegunaan praktis dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai pengaruh bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung dengan menggunakan pendekatan *Interrupted Time Series* (ITS). Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tren tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung sebelum intervensi bantuan sosial PKH diterapkan?
2. Apakah intervensi bantuan sosial PKH berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung ketika intervensi bantuan sosial PKH diterapkan?
3. Bagaimana tren tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung setelah intervensi bantuan sosial PKH diterapkan dengan mengontrol faktor-faktor variabel ekonomi?
4. Bagaimana pengaruh variabel kontrol (PDRB per Kapita) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung?
5. Bagaimana pengaruh variabel kontrol (Inflasi) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjelaskan secara spesifik mengenai capaian yang ingin diperoleh melalui pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tren tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung sebelum intervensi bantuan sosial PKH diterapkan?
2. Menganalisis dampak bantuan sosial PKH terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung ketika intervensi bantuan sosial PKH diterapkan.
3. Menganalisis tren tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2011-2024 setelah intervensi bantuan sosial PKH diterapkan dengan mengontrol faktor-faktor variabel ekonomi.
4. Menganalisis pengaruh variabel kontrol (PDRB per Kapita) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.
5. Menganalisis pengaruh variabel kontrol (Inflasi) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai dampak bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Hasilnya diharapkan dapat memperkaya pemahaman ilmiah terkait mekanisme kerja dan dampak dari intervensi kebijakan sosial terhadap kelompok masyarakat miskin.
2. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang ekonomi pembangunan dan kebijakan sosial, khususnya terkait analisis dampak bantuan sosial PKH terhadap tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan data kuantitatif berbasis model *Interrupted Time Series (ITS)*, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam menganalisis dampak kebijakan sosial secara longitudinal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Kemiskinan dan Intervensi Bantuan Sosial

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya dipahami sebagai kekurangan pendapatan, melainkan juga keterbatasan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, berbagai teori tentang kemiskinan hadir untuk menyingkap akar persoalan dan mekanisme yang membuat kemiskinan terus berulang di tengah masyarakat. Dalam literatur ekonomi, pandangan mengenai kemiskinan berkembang dari teori klasik hingga teori modern. Namun, dalam penelitian ini yang mengenai dampak bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan dengan mempertimbangkan variabel kontrol seperti PDRB dan inflasi, penulis memilih dua teori utama yang dianggap paling relevan, yaitu Teori Keynesian, dan Teori Poverty Trap.

2.1.1.1 Teori Keynesian

Teori Keynesian merupakan salah satu pendekatan ekonomi makro yang sangat berpengaruh dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1936). Analisis mengenai kemiskinan dalam penelitian ini didasarkan pada perspektif Keynesian yang menekankan peran pemerintah dalam mengelola perekonomian melalui kebijakan fiskal dan permintaan agregat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Pendekatan Kebijakan Fiskal terhadap Kemiskinan

Pemerintah memiliki peran aktif dalam mengatasi permasalahan ekonomi, termasuk kemiskinan, melalui instrumen kebijakan fiskal, dalam perspektif John Maynard Keynes. Pemerintah dapat mengatasi permasalahan kemiskinan melalui kebijakan fiskal ekspansif, yaitu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, termasuk dalam bentuk program bantuan sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan disposabel masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, sehingga dapat memperbaiki daya beli dan akses terhadap kebutuhan dasar. Kebijakan fiskal yang dimaksud meliputi pengeluaran pemerintah, subsidi, dan bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai akibat dari keterbatasan individu, tetapi juga sebagai hasil dari kurang optimalnya intervensi pemerintah dalam distribusi pendapatan dan penyediaan jaring pengaman sosial. Bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal yang dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan bentuk nyata dari fungsi redistribusi pemerintah yang bertujuan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial sehingga menurunkan tingkat kemiskinan.

Kebijakan fiskal memiliki fungsi stabilisasi, yaitu menjaga perekonomian dari fluktuasi siklus bisnis. Dalam kondisi ekonomi yang lesu, peningkatan belanja pemerintah, termasuk melalui bantuan sosial, dapat mendorong permintaan agregat dan mengurangi dampak negatif seperti pengangguran dan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan konsep *multiplier effect* dalam teori Keynesian, di mana peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan konsumsi, peningkatan konsumsi ini akan merangsang produksi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang lebih besar melalui mekanisme *multiplier effect* yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi beserta penurunan tingkat kemiskinan (Mankiw, 2021).

Kebijakan fiskal juga berperan dalam fungsi alokasi, yaitu memastikan penyediaan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial

merupakan salah satu faktor struktural penyebab kemiskinan. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui belanja publik menjadi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan jangka panjang. Sejumlah penelitian empiris mendukung pandangan di atas dengan menunjukkan bahwa belanja sosial pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan (Langoday, 2024; Suryahadi *et al.*, 2021). Dengan demikian, pembelanjaan pemerintah yang di dalamnya terdapat bantuan sosial juga memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian secara keseluruhan (Sumiyarti, 2022).

2. Pendekatan Permintaan Agregat terhadap Kemiskinan

Teori Keynesian juga menjelaskan kemiskinan melalui mekanisme permintaan agregat. Permintaan agregat merupakan total permintaan terhadap barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Dalam kondisi di mana permintaan agregat rendah, aktivitas ekonomi akan menurun, sehingga berdampak pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Dalam kerangka ini, kemiskinan dapat terjadi karena rendahnya kemampuan konsumsi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Ketika daya beli masyarakat menurun, permintaan terhadap barang dan jasa ikut menurun, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan permintaan agregat menjadi kunci dalam mengurangi kemiskinan. Pemerintah dipandang memiliki fungsi intervensi aktif, khususnya melalui pengeluaran fiskal yang ditujukan untuk mendorong konsumsi masyarakat dan mengurangi pengangguran. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan ini adalah pemberian bantuan sosial kepada rumah tangga miskin. Ketika konsumsi meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa juga naik, yang pada gilirannya mendorong produsen meningkatkan output dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Bantuan sosial dapat meningkatkan daya beli kelompok berpendapatan rendah, sehingga mereka mampu meningkatkan konsumsi kebutuhan pokok, yang sejalan dengan penelitian oleh Murwiati, (2023) yang menunjukkan bahwa bantuan sosial berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin

cenderung memiliki kecenderungan mengkonsumsi (marginal propensity to consume) yang tinggi, sebagaimana yang dikatakan Keynes bahwa belanja pemerintah yang diarahkan pada kelompok miskin akan lebih efektif dalam menstimulasi perekonomian karena kelompok ini memiliki marginal propensity to consume (MPC) yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kaya. seperti tercantum pada penelitian oleh Danil, (2018) bahwa kecenderungan konsumsi untuk pangan lebih besar pada masyarakat miskin dibandingkan dengan masyarakat kaya. Artinya, hampir seluruh bantuan yang diterima akan dibelanjakan untuk konsumsi, sehingga efek penggandanya lebih besar yang pada akhirnya mendorong perputaran ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak hanya berdampak langsung pada penerima, tetapi juga memberikan efek tidak langsung terhadap perekonomian secara keseluruhan (Mankiw, 2019).

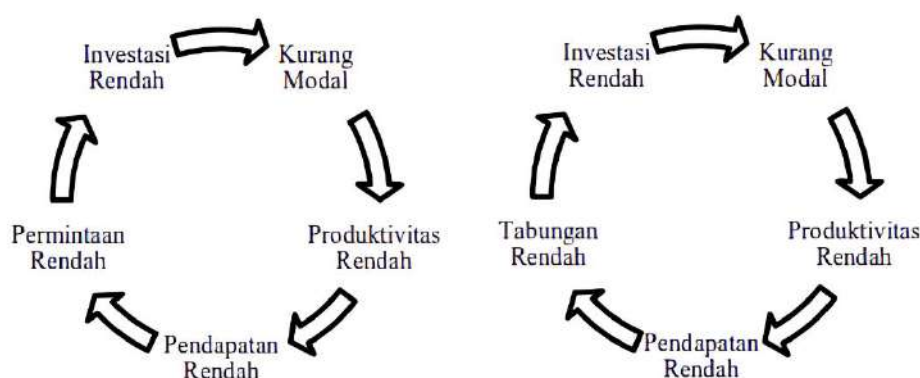
Kerangka Keynesian didukung dalam penelitian empiris yang terbukti relevan untuk menjelaskan peran bantuan sosial terhadap kemiskinan di Indonesia. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) telah terbukti meningkatkan daya beli rumah tangga miskin (Salsabila *et al.*, 2024) dan kemudian, berdampak pada penurunan angka kemiskinan secara agregat, yang berarti PKH memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan (Waluyo & Khoirunurrofik, 2021). Dengan demikian, teori Keynesian memberikan dasar yang kuat untuk menjelaskan bagaimana bantuan sosial dapat menekan angka kemiskinan melalui peningkatan permintaan agregat dengan meningkatkan konsumsi.

2.1.1.2 Teori Poverty Trap

Teori poverty trap atau jebakan kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953) dalam bukunya yang berjudul *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries* dan Richard R. Nelson (1956) dalam artikelnya *A Theory of the Low-Level Equilibrium Trap* menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kekurangan pendapatan semata, tetapi merupakan hasil dari suatu siklus yang saling memperkuat dan sulit diputus tanpa adanya intervensi eksternal. Dalam kondisi ini, rumah tangga atau masyarakat miskin terperangkap dalam lingkaran kemiskinan akibat keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber

daya manusia, dan akses yang terbatas terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta modal usaha. (Chen, 2025) menjelaskan bahwa poverty trap terjadi ketika pendapatan rendah menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi, sehingga produktivitas tetap rendah dan pendapatan tidak meningkat. Siklus ini membentuk keseimbangan rendah (low-level equilibrium) yang sulit diubah tanpa dorongan dari luar seperti bantuan sosial, kebijakan fiskal, atau pembangunan.

Nurkse berpendapat bahwa rendahnya pendapatan di negara berkembang menyebabkan rendahnya tabungan, tabungan yang kecil menghambat investasi, investasi yang terbatas mengakibatkan produktivitas tetap rendah, dan akhirnya memperkuat kondisi kemiskinan yang sudah ada. Nelson (1956) memperluas konsep ini dengan menjelaskan bahwa tanpa adanya investasi modal yang cukup besar, ekonomi suatu wilayah akan terus terjebak dalam kondisi stagnan dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang rendah. Mekanisme ini kemudian menghasilkan efek antar-generasi, di mana anak-anak dari keluarga miskin memiliki peluang yang lebih kecil untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, sehingga siklus kemiskinan berulang di generasi berikutnya. Berikut gambar lingkaran kemiskinan teori poverty trap:



Sumber: Jhingan (2014, dalam Rahman & Alamsyah, 2019)

Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan Sisi Permintaan (Kiri) dan Penawaran (Kanan).

Gambar pada sisi kiri menjelaskan bahwa kemiskinan dapat terjadi karena lemahnya permintaan agregat dalam suatu perekonomian. Ketika pendapatan

masyarakat rendah, daya beli mereka menjadi terbatas, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa pun menurun. Kondisi ini mengurangi insentif bagi pelaku usaha untuk memperluas produksi karena pasar tidak cukup kuat menyerap hasil produksinya. Akibatnya, tingkat investasi menurun dan pembentukan modal menjadi terbatas, baik dalam bentuk modal fisik seperti peralatan dan infrastruktur, maupun modal manusia seperti pendidikan dan keterampilan. Rendahnya investasi ini kemudian menekan produktivitas tenaga kerja, sehingga output dan pendapatan masyarakat tetap rendah. Siklus tersebut berulang dan membentuk jebakan kemiskinan dari sisi permintaan. Pandangan ini sejalan dengan teori Keynesian yang menekankan bahwa lemahnya daya beli masyarakat menyebabkan kurangnya permintaan agregat, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperparah kemiskinan (Keynes, 1936). Sementara itu, gambar pada sisi kanan menunjukkan bahwa jebakan kemiskinan juga dapat terjadi dari sisi penawaran atau kapasitas produksi. Pendapatan yang rendah menyebabkan tingkat tabungan masyarakat miskin sangat terbatas, sehingga mereka tidak memiliki cukup modal untuk melakukan investasi baik investasi dalam kegiatan usaha, peningkatan keterampilan, pendidikan, maupun kesehatan. Rendahnya investasi tersebut menghambat proses peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penggunaan teknologi. Akibatnya, hasil produksi tetap kecil, pendapatan tidak meningkat, dan kondisi kemiskinan terus berlanjut dari satu periode ke periode berikutnya.

Teori poverty trap juga dalam konteks pembangunan ekonomi modern, menyoroti pentingnya modal manusia sebagai faktor kunci untuk keluar dari kemiskinan. Rendahnya pendidikan, gizi, dan akses kesehatan menurunkan produktivitas tenaga kerja dan membatasi kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Studi oleh Iswanto (2008, dalam Ulinuha *et al.*, 2024) menegaskan bahwa peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja merupakan salah satu strategi paling efektif dalam memutus lingkaran kemiskinan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan Haidir & Setyari, (2024) yang menyatakan bahwa akses terhadap pendidikan dasar memiliki peran penting dalam meningkatkan mobilitas ekonomi dan mengurangi risiko poverty trap di tingkat provinsi. Selain itu, penelitian Fatmawati & Preatin, (2022) di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa faktor-

faktor seperti sanitasi, kondisi permukiman, dan pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan ekstrem, memperkuat asumsi bahwa poverty trap tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga multidimensional.

Teori poverty trap menjadi relevan dalam kerangka penelitian ini, karena menjelaskan bagaimana bantuan sosial (social assistance) berperan sebagai intervensi eksternal yang dapat memutus siklus kemiskinan. Bantuan sosial meningkatkan pendapatan sementara rumah tangga miskin, memperkuat konsumsi dasar, dan membuka peluang investasi kecil seperti usaha mikro atau peningkatan gizi dan pendidikan anak, bukti empiris menunjukkan bahwa program bantuan sosial di banyak negara berkembang mampu memutus poverty trap dengan mendorong investasi rumah tangga pada pendidikan dan kesehatan anak, yang pada gilirannya berdampak positif dalam jangka panjang terhadap penurunan kemiskinan (Millán *et al.*, 2019; Syahwanes *et al.*, 2025). Namun, efektivitasnya juga dipengaruhi oleh faktor makroekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan inflasi. PDRB per kapita menggambarkan kapasitas ekonomi wilayah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan, sementara inflasi memengaruhi daya beli rumah tangga miskin dan dapat memperlemah efek bantuan sosial terhadap pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, teori poverty trap tidak hanya menjelaskan akar penyebab kemiskinan, tetapi juga memberikan dasar konseptual untuk memahami pentingnya kebijakan sosial dan stabilitas ekonomi makro dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

2.1.2 Kemiskinan

2.1.2.1 Konsep dan Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang kompleks, melampaui sekadar ketiadaan pendapatan atau konsumsi. Kemiskinan pada umumnya diukur menggunakan acuan garis kemiskinan (kemiskinan moneter), yang ditentukan berdasarkan besaran pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tertentu (Ratih *et al.*, 2023). Secara tradisional, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan

dasar minimum seperti pangan, sandang, dan papan (World Bank, 2020b). Pendekatan ini dikenal sebagai kemiskinan absolut, yaitu kondisi ketika seseorang hidup di bawah garis kemiskinan moneter yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok. Namun, pemahaman tentang kemiskinan terus berkembang. Kemiskinan relatif muncul ketika seseorang meskipun memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan absolut, tetap dianggap miskin karena tidak mampu berpartisipasi dalam standar hidup umum di masyarakatnya (Todaro & Smith, 2015)

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pendekatannya menggunakan kemiskinan multidimensi, yang tidak hanya mengukur kemiskinan berdasarkan pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan (Badan Pusat Statistik, 2022). Sementara itu, UNDP (2023) menekankan kemiskinan sebagai keterbatasan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Definisi ini memperluas cakupan dari sekadar pendapatan menuju kemiskinan multidimensi, di mana faktor sosial, psikologis, dan partisipasi publik turut dipertimbangkan. Di Indonesia, pengukuran kemiskinan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yang mendefinisikan penduduk miskin sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan nonmakanan minimum (Badan Pusat Statistik, 2023d). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada September 2024 garis kemiskinan nasional tercatat sebesar Rp595.242 per kapita per bulan. Dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin sebesar 4,71 orang, maka garis kemiskinan rumah tangga secara nasional mencapai sekitar Rp2.803.590 per bulan. Di Provinsi Lampung, garis kemiskinan rumah tangga tercatat sebesar Rp2.821.375 per bulan atau Rp599.018 per kapita perbulan, yang mencerminkan batas minimum pengeluaran yang harus dipenuhi agar suatu rumah tangga tidak tergolong miskin (Badan Pusat Statistik, 2025b).

BPS menggunakan tiga indikator utama untuk menggambarkan kondisi kemiskinan secara lebih komprehensif, yaitu persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Persentase penduduk miskin (P0) atau *headcount index* menunjukkan proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk. Indikator ini menggambarkan luasnya masalah kemiskinan dan menjadi ukuran utama dalam evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. P0 sangat relevan dalam analisis kebijakan bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), karena secara langsung mencerminkan jumlah penduduk yang menjadi sasaran program (Badan Pusat Statistik, 2025a). Penelitian ini, indikator kemiskinan yang digunakan sebagai variabel utama adalah P0. Pemilihan indikator ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan Program Keluarga Harapan yang berfokus pada pengurangan jumlah penduduk miskin secara agregat, serta ketersediaan data deret waktu yang konsisten untuk mendukung analisis *Interrupted Time Series* (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021).

2.1.2.2 Jenis-Jenis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena sosial-ekonomi yang kompleks dan multidimensional, sehingga para ahli membedakan bentuk-bentuk kemiskinan berdasarkan penyebab dan karakteristiknya. Pembagian ini bertujuan untuk memahami kemiskinan secara lebih mendalam serta menemukan pendekatan kebijakan yang tepat dalam menanggulunginya. Secara umum, jenis-jenis kemiskinan dapat dikategorikan menjadi kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural sebagai berikut :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut menggambarkan kondisi ketika individu atau rumah tangga memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan oleh negara atau lembaga statistik resmi. Dalam kondisi ini, pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bersifat esensial, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan absolut mencerminkan situasi keterbatasan

ekonomi paling mendasar, di mana individu benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum untuk bertahan secara layak.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif terjadi ketika pembangunan ekonomi atau kebijakan distribusi kesejahteraan tidak berjalan secara merata di seluruh wilayah atau kelompok masyarakat. Akibatnya, muncul ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga ada sekelompok masyarakat yang meskipun tidak berada di bawah garis kemiskinan absolut, tetap dikategorikan miskin karena tidak mampu mencapai standar hidup yang umum berlaku di masyarakat sekitarnya. Dalam konteks ini, kemiskinan relatif lebih menekankan pada adanya disparitas atau kesenjangan sosial-ekonomi antar kelompok atau antarwilayah.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural berakar pada nilai, norma, dan kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian membentuk pola pikir serta perilaku yang tidak produktif. Faktor budaya ini, misalnya, terlihat dalam rendahnya aspirasi pendidikan, keengganan mengadopsi teknologi baru, atau kecenderungan untuk bergantung pada pola kerja tradisional yang tidak mendukung peningkatan produktivitas. Dengan demikian, kemiskinan kultural seringkali bersifat turun-temurun karena diwariskan melalui pola hidup dan nilai-nilai yang dianut suatu komunitas.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural muncul akibat adanya ketidakadilan dalam struktur sosial, ekonomi, maupun politik yang melekat pada suatu kelompok masyarakat. Dalam kondisi ini, meskipun sumber daya tersedia, masyarakat miskin tetap tidak mampu mengakses atau memanfaatkannya secara optimal karena adanya hambatan struktural seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, serta kepemilikan aset produktif. Dengan kata lain, kemiskinan struktural bukan sekadar akibat keterbatasan individu, melainkan hasil dari sistem sosial-ekonomi yang menciptakan eksklusi dan ketidaksetaraan. (Khomsan *et al.*, 2015).

2.1.2.3 Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan pendapatan, tetapi juga oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun struktural. Menurut World Bank, (2020), penyebab kemiskinan dapat dilihat dari dua dimensi utama, yaitu faktor internal rumah tangga seperti tingkat pendidikan dan keterampilan serta faktor eksternal yang bersumber dari sistem ekonomi dan kebijakan publik. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2022) mengidentifikasi kemiskinan tidak hanya berasal dari rendahnya pendapatan, tetapi juga akibat akses terbatas terhadap layanan dasar, perbedaan kesempatan kerja, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Secara ekonomi, kemiskinan dipicu oleh rendahnya pendapatan, tingginya tingkat pengangguran, serta tekanan inflasi. Inflasi yang tinggi, khususnya pada kebutuhan pokok, akan menurunkan daya beli masyarakat miskin sehingga memperburuk kerentanan mereka (Hadna & Askar, 2022). Demikian pula, keterbatasan kesempatan kerja menyebabkan sebagian besar penduduk tetap berada dalam lingkaran kemiskinan. Dalam perspektif Teori Keynesian, rendahnya pendapatan rumah tangga miskin mencerminkan lemahnya permintaan agregat, yang kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, bantuan sosial berfungsi sebagai stimulus fiskal yang meningkatkan konsumsi, sehingga dapat meredam dampak inflasi dan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih inklusif (Halimah *et al.*, 2024)

Menurut sisi sosial, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses kesehatan, serta faktor demografi seperti tingginya jumlah tanggungan rumah tangga, berkontribusi signifikan terhadap kemiskinan. Rumah tangga dengan pendidikan rendah cenderung memiliki keterampilan terbatas, sehingga sulit bersaing di pasar kerja formal. Selain itu, akses kesehatan yang terbatas menghambat produktivitas dan memperbesar beban pengeluaran (UNDP, 2023). Kondisi ini dapat dijelaskan melalui Teori Kapabilitas (Amartya Sen), yang menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya kekurangan pendapatan, tetapi keterbatasan kemampuan (*capabilities*)

untuk mencapai kehidupan yang layak. Bantuan sosial, baik dalam bentuk transfer tunai maupun program bersyarat seperti PKH, dapat memperluas kapabilitas masyarakat miskin dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, sehingga memperkuat potensi keluar dari kemiskinan dalam jangka panjang (Sri Wahyuni & Prima Putra, 2025).

Kemiskinan juga bersumber dari persoalan struktural selain faktor ekonomi dan sosial, seperti ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, ketimpangan wilayah, dan distribusi sumber daya yang tidak adil. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses memadai terhadap sumber daya produktif seperti lahan, modal, atau jaringan distribusi pasar. Kondisi ini menimbulkan perangkap kemiskinan yang sulit diputus. Dalam kerangka Teori Poverty Trap, kondisi struktural tersebut menciptakan lingkaran setan kemiskinan: rendahnya pendapatan mengakibatkan rendahnya tabungan, yang kemudian menghambat investasi, menurunkan produktivitas, dan kembali menghasilkan pendapatan rendah (Nurkse, 1953; Nelson, 1956). Bantuan sosial dalam konteks ini berfungsi sebagai intervensi eksternal yang dapat menjadi modal awal untuk memutus lingkaran kemiskinan. Misalnya, subsidi pangan atau bantuan tunai dapat memberi ruang bagi rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok sekaligus berinvestasi pada pendidikan atau usaha kecil, yang dalam jangka panjang membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan (Syahwanes *et al.*, 2025).

Dengan demikian, faktor penyebab kemiskinan saling terkait dan berlapis, melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan struktural. Bantuan sosial menjadi instrumen penting karena dapat menjawab ketiga dimensi tersebut sekaligus: secara ekonomi meningkatkan daya beli (Keynesian), secara sosial memperluas kapabilitas (Amartya Sen), dan secara struktural memutus lingkaran kemiskinan (Poverty Trap). Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia dan khususnya Provinsi Lampung yang masih menghadapi tingkat kemiskinan cukup tinggi, analisis mengenai dampak bantuan sosial menjadi sangat relevan dan signifikan.

2.1.3 Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

2.1.3.1 Definisi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang bersifat tidak terus-menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (BPK RI, 2016). Program bantuan sosial di Indonesia meliputi berbagai skema, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penelitian oleh Salsabila *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa program-program ini telah membantu meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan memberikan perlindungan sosial yang lebih baik. Dan dari berbagai program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program sosial yang paling efektif meningkatkan kesejahteraan sehingga menurunkan kemiskinan. Dan bansos tidak hanya membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki fungsi strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan pendapatan (Huda *et al.*, 2024).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial utama bersyarat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan sasaran utama rumah tangga miskin dan rentan. PKH dirancang sebagai bentuk intervensi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberian bantuan tunai yang dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan karakteristik tersebut, PKH termasuk dalam kategori *conditional cash transfer* yang menekankan perubahan perilaku penerima manfaat. Tujuan utama PKH adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin sekaligus mendorong investasi sumber daya manusia sejak dini. Dalam jangka pendek, PKH diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga konsumsi minimum rumah tangga miskin. Sementara itu, dalam jangka panjang, PKH diarahkan untuk memutus rantai

kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dari keluarga miskin (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). Sasaran bantuan sosial PKH secara eksplisit ditujukan terutama kepada rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin menurut data resmi, yaitu mereka yang berada di bawah garis kemiskinan yang diukur oleh BPS melalui indikator Headcount Index (P0), yaitu persentase penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan nasional (Badan Pusat Statistik, 2025a).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bantuan sosial PKH memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan. Penelitian oleh Sinaga *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa program perlindungan sosial terutama PKH efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk miskin di Sumatra Utara. Hasil Studi oleh Astuti, (2025) menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) cukup efektif dalam mengurangi kemiskinan di Kecamatan Sendana, Kota Palopo. Efektivitas tersebut dipengaruhi oleh ketepatan sasaran penerima bantuan serta mekanisme penyaluran yang baik, sehingga pengelolaan program menjadi aspek yang sangat penting.

Menurut perspektif teori ekonomi, bantuan sosial dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan. Pertama, teori Keynesian menekankan bahwa bansos berfungsi sebagai stimulus konsumsi, yang kemudian meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang sejalan dalam penelitian Halimah *et al.*, (2024). Kedua, teori kapabilitas (Amartya Sen) menegaskan bahwa bansos tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperluas kapabilitas dasar masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial, yang sejalan dalam pembahasan penelitian oleh Djulius *et al.*, (2022). Ketiga, teori poverty trap menjelaskan bahwa bansos dapat berperan sebagai pemutus lingkaran setan kemiskinan dengan menyediakan modal awal untuk konsumsi, pendidikan, atau usaha produktif, sehingga memberi peluang keluar dari jerat kemiskinan antargenerasi sejalan dengan penelitian oleh Yanti & Adi, (2021).

Dengan demikian, bantuan sosial memiliki peran yang signifikan tidak hanya dalam jangka pendek sebagai penyangga daya beli, tetapi juga dalam jangka panjang

sebagai instrumen peningkatan kualitas hidup dan pemutus lingkaran kemiskinan. Namun, efektivitas bansos tetap bergantung pada ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan tata kelola yang baik dalam implementasinya (Astuti, 2025). Begitu juga dalam penelitian oleh Salsabila *et al.*, (2024) yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa program-program bantuan sosial telah membantu meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan memberikan perlindungan sosial yang lebih baik. Namun, efektivitas program bantuan sosial sering kali terhambat oleh masalah ketepatan sasaran, transparansi, dan ketergantungan penerima. Evaluasi terhadap program bantuan sosial menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kesejahteraan jangka pendek, terdapat risiko ketergantungan yang dapat menghambat kemandirian ekonomi penerima bantuan. Menurut penelitian oleh Halawa, (2023), penting untuk mengintegrasikan program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi agar penerima bantuan dapat meningkatkan kapasitas diri dan keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.

Implementasi program bantuan sosial khususnya PKH di Provinsi Lampung, menghadapi tantangan tersendiri. Studi oleh Efendi & Utami, (2025) menunjukkan bahwa distribusi bantuan sosial salah satunya PKH di daerah terpencil sering kali mengalami keterlambatan dan ketidaktepatan sasaran, yang disebabkan oleh persoalan administrasi dan distribusi, kurangnya data yang akurat dan infrastruktur yang memadai. Hal ini menekankan pentingnya sistem pendataan yang terintegrasi dan penggunaan teknologi informasi dalam penyaluran bantuan sosial. Untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial, diperlukan pendekatan yang adaptif dan berbasis data. Penggunaan model analisis seperti Interrupted Time Series dapat membantu dalam mengevaluasi dan menganalisis dampak program maupun secara umum dari bantuan sosial secara longitudinal dan mengidentifikasi perubahan signifikan dalam tren kemiskinan sebelum dan sesudah implementasi program. Dengan demikian, kebijakan bantuan sosial dapat disesuaikan dengan konsepnya secara dinamis untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.

2.1.3.2 Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

Secara konseptual, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial nasional yang bertujuan tidak hanya memberikan bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan perilaku rumah tangga miskin agar lebih berorientasi pada investasi sumber daya manusia. PKH dirancang sebagai instrumen kebijakan yang mengombinasikan bantuan tunai dengan persyaratan kepesertaan, sehingga bantuan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan secara berkelanjutan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021).

PKH memiliki tujuan utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi dalam kerangka kebijakan publik. Tujuan tersebut dicapai melalui peningkatan konsumsi dasar rumah tangga miskin serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anggota keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, PKH tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*), tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang berorientasi jangka panjang (Hadna & Askar, 2022). Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) diuraikan dalam panduan pelaksanaan PKH sebagai berikut:

A. Tujuan PKH

1. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

Pencapaian tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) didukung oleh pengaturan kelembagaan dan dasar hukum yang jelas, sehingga pelaksanaan program memiliki kepastian regulasi dan arah kebijakan yang terstruktur.

B. Dasar Hukum dan Kelembagaan Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan PKH memiliki dasar hukum yang kuat sebagai bagian dari kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan yang di mulai sejak tahun 2007 sebagai pemulaan di tujuh provinsi, dan kemudian diperluas secara bertahap yang bermula dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara berkeadilan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019; Undang-Undang Republik Indonesia, 2004). Penguatan arah kebijakan PKH tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memprioritaskan kelompok fakir miskin sebagai sasaran utama kebijakan publik (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009, 2011), di tahun 2011 tersebut dimulainya pemberlakuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur No. 82 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung Tahun 2011 (Jdih.lampungprov, 2011; Undang-Undang Republik Indonesia, 2011). Kemudian, implementasi dan tata kelola PKH kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, yang memperkuat mekanisme penargetan, penyaluran, dan kewajiban penerima manfaat sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, 2018).

Secara kelembagaan, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan kerja sama antara berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Pada tingkat nasional, kelembagaan PKH terdiri dari tim koordinasi nasional, tim koordinasi teknis, serta unit pelaksana PKH pusat. Sementara itu, pada tingkat daerah terdapat tim koordinasi teknis PKH di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, unit pelaksana PKH provinsi dan kabupaten/kota, hingga pelaksana di tingkat kecamatan yang dijalankan oleh pendamping PKH. Keberadaan pendamping memiliki peran strategis dalam memastikan penerima manfaat memenuhi persyaratan program serta

mendorong terjadinya perubahan perilaku sosial dan ekonomi pada keluarga miskin. (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021).

C. Kriteria Penerima Manfaat PKH

Sasaran utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga miskin dan rentan miskin yang telah terdaftar dalam basis data nasional, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penerima manfaat dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti keberadaan anak usia sekolah, ibu hamil, balita, lansia, atau penyandang disabilitas yang dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Penetapan sasaran ini mencerminkan fokus PKH pada kelompok yang memiliki risiko kemiskinan struktural dan kerentanan sosial ekonomi (Nugroho *et al.*, 2024). Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) ditetapkan berdasarkan komponen kepesertaan yang mencerminkan kelompok rumah tangga miskin dengan tingkat kerentanan sosial tertentu. Kriteria penerima PKH meliputi tiga komponen utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021), dengan rincian sebagai berikut.

1. Komponen Kesehatan
 - a) Ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui yang berada dalam satu keluarga penerima manfaat.
 - b) Anak usia dini berusia 0-6 tahun yang belum mengikuti pendidikan formal.
2. Komponen Pendidikan
 - a) Anak usia sekolah berusia 6–21 tahun yang belum menyelesaikan program wajib belajar.
 - b) Anak yang menempuh pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.
3. Komponen Kesejahteraan Sosial
 - a) Lanjut usia yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan tinggal dalam satu keluarga.

- b) Penyandang disabilitas berat yang memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan bergantung pada orang lain.

D. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

Keluarga yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan kriteria kepesertaan PKH, pelaksanaan program selanjutnya mengatur hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap KPM sebagai bentuk tanggung jawab dalam menerima bantuan sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). Berikut hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH:

1. Hak Keluarga Penerima Manfaat PKH

- a) Menerima bantuan sosial PKH sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Mendapatkan pendampingan sosial dari pendamping PKH.
- c) Memperoleh akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- d) Mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2. Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

- a) Memenuhi kewajiban pada komponen kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan anak usia dini.
- b) Memenuhi kewajiban pada komponen pendidikan, yaitu mengikuti program wajib belajar dua belas tahun dengan tingkat kehadiran minimal 85 persen dari hari belajar efektif.
- c) Mengikuti kegiatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat minimal satu kali dalam satu tahun.
- d) Menghadiri pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan setiap bulan.
- e) Memenuhi seluruh kewajiban program, kecuali dalam kondisi force majeure.

Terpencil (KAT), digunakan mekanisme pengecualian agar kelompok rentan tersebut tetap memperoleh perlindungan sosial yang sesuai.

2. Pertemuan Awal dan Validasi

Pendamping sosial mengadakan Pertemuan Awal (PA) melakukan sosialisasi program kepada calon peserta, yang mencakup penjelasan mengenai tujuan PKH, kriteria kepesertaan, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu, pendamping melakukan validasi data dengan mencocokkan informasi DTKS dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk bukti fisik dan keberadaan komponen PKH dalam keluarga. Validasi dilakukan menggunakan aplikasi e-PKH, dan apabila calon peserta tidak hadir dalam pertemuan awal, pendamping wajib melakukan kunjungan rumah untuk memastikan kelayakan kepesertaan.

3. Penetapan KPM PKH

Data hasil validasi lapangan sesuai kriteria selanjutnya diproses secara administratif oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial. Penetapan KPM dilakukan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga sebagai dasar legal kepesertaan. Pada tahap ini, hanya calon peserta yang memiliki rekening bank aktif yang dapat ditetapkan secara resmi sebagai KPM PKH.

4. Penyaluran Bantuan Sosial

a) Bentuk Bantuan Sosial

Program Keluarga Harapan (PKH) menyalurkan bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat miskin yang telah ditetapkan secara resmi sebagai penerima manfaat. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang menjadi dasar legal bagi kepesertaan dalam program PKH.

b) Tahapan Penyaluran Bantuan Sosial

Bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara bertahap selama satu tahun anggaran berjalan. Proses penyaluran tersebut mengikuti pola dan jadwal yang telah

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial guna menjamin keberlanjutan bantuan dan optimalisasi pelaksanaan program.

c) Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Bantuan sosial PKH disalurkan menggunakan sistem non-tunai dengan memanfaatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) maupun buku tabungan penerima. Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH meliputi beberapa tahapan sebagai berikut.

- 1) Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial
- 2) Sosialisasi dan Edukasi
- 3) Distribusi KKS kepada KPM
- 4) Proses Penyaluran Bantuan Sosial kepada KPM
- 5) Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH
- 6) Rekonsiliasi Hasil Penyaluran Bantuan Sosial PKH
- 7) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Sosial

d) Pemanfaatan Bantuan Sosial

Bantuan sosial yang diterima oleh peserta PKH dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta sebagai modal usaha dan kebutuhan lain yang relevan. Pemanfaatan bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan utama PKH, yaitu peningkatan kesejahteraan dan kemandirian keluarga penerima manfaat.

5. Pemutakhiran Data

Mengingat kondisi sosial ekonomi keluarga bersifat dinamis, data kepesertaan PKH harus diperbarui secara berkala. Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping melalui aplikasi e-PKH setiap kali terjadi perubahan, seperti status kehamilan, jenjang pendidikan anak, perubahan domisili, maupun perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga. Pemutakhiran ini berfungsi sebagai dasar dalam proses verifikasi, evaluasi, serta penghentian bantuan apabila keluarga tidak lagi memenuhi kriteria.

6. Verifikasi Komitmen

Sebagai program bantuan bersyarat, kelangsungan bantuan PKH bergantung pada kepatuhan KPM dalam memenuhi kewajiban akses layanan dasar. Pendamping melakukan verifikasi secara berkala terhadap kehadiran anak di sekolah, kunjungan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak, serta partisipasi lanjut usia atau penyandang disabilitas dalam layanan kesejahteraan sosial. Hasil verifikasi komitmen menjadi dasar dalam menentukan apakah bantuan tetap disalurkan, ditangguhkan, atau dihentikan.

7. Pendampingan

Pendamping sosial berperan sebagai fasilitator, mediator, edukator, dan motivator bagi keluarga penerima manfaat. Pendampingan dilakukan melalui pertemuan kelompok dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), yang memberikan materi terstruktur mengenai pengasuhan anak, kesehatan keluarga, pengelolaan keuangan, serta perlindungan anak. Tahap ini bertujuan menciptakan perubahan pola pikir dan perilaku KPM agar lebih mandiri dan produktif.

8. Transformasi Kepesertaan

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan masa kepesertaan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama kurang lebih enam tahun. Dalam kurun waktu tersebut, program ini diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku yang positif pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Pengakhiran kepesertaan dilakukan melalui proses transformasi yang dikenal sebagai resertifikasi. Tahapan ini melibatkan pendataan kembali serta penilaian terhadap kondisi sosial ekonomi KPM setelah menerima bantuan dalam jangka waktu tertentu. Resertifikasi dilaksanakan pada tahun kelima sebagai tahap evaluasi sebelum masa kepesertaan berakhir, dan hasilnya menjadi dasar penentuan apakah KPM akan melanjutkan ke tahap transisi atau keluar dari program melalui mekanisme graduasi.

a) Transisi

Transisi adalah tahap yang diberikan kepada KPM PKH yang dinilai masih memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Dalam periode ini, bantuan PKH

masih diberikan hingga tiga tahun ke depan, dengan kewajiban untuk tetap mematuhi ketentuan program serta mempersiapkan diri mengikuti program penanggulangan kemiskinan lainnya.

b) Graduasi

Graduasi merupakan pengakhiran kepesertaan PKH bagi KPM yang tidak lagi memenuhi kriteria program, yang meliputi: (1) keluarga yang masih tergolong miskin namun tidak lagi memiliki komponen PKH; (2) keluarga yang sudah tidak miskin tetapi masih memiliki komponen PKH; serta (3) keluarga yang sudah tidak tergolong miskin dan tidak lagi memenuhi komponen persyaratan PKH akan mengalami proses graduasi dari program. Ketentuan mengenai mekanisme graduasi ini diatur secara khusus dalam pedoman teknis graduasi Keluarga Penerima Manfaat PKH.

F. Indeks Bantuan Sosial PKH

Kategori penerima dan Indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya mencakup keluarga memiliki beberapa kategori, seperti ibu hamil/nifas, anak-anak sekolah (SD, SMP, SMA/ sederajat), penyandang disabilitas berat, dan lansia. Penerima manfaat harus memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sudah dirubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Berikut ini indeks bantuan sosial yang diterima KPM PKH:

Tabel 2.1 Indeks Bantuan Sosial yang diterima KPM PKH

No	Kategori	Indek/Tahun Rp.	Indeks/3 bulan Rp.	Indeks/2 bulan Rp.	Indeks/bulan Rp.
1.	Ibu Hamil	3.000.000	750.000	500.000	250.000
2.	Anak usia 0 sd 6 tahun	3.000.000	750.000	500.000	250.000
3.	Anak Sekolah SD	900.000	225.000	150.000	75.000
4.	Anak Sekolah SLTP	1.500.000	375.000	250.000	125.000
5.	Anak Sekolah SLTA	2.000.000	500.000	333.333	166.666
6.	Disabilitas berat	2.400.000	600.000	400.000	200.000
7.	Lanjut Usia 60 tahun ke atas	2.400.000	600.000	400.000	200.000
8.	Korban Pelanggaran HAM Berat	10.800.000	2.700.000	1.800.000	900.000

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia, (2025)

2.1.4 Metode Interrupted Time Series

Metode *Interrupted Time Series* (ITS) merupakan salah satu desain kuasi-eksperimental yang digunakan untuk mengevaluasi efek dari suatu intervensi atau kebijakan publik terhadap suatu fenomena sosial atau ekonomi berdasarkan data deret waktu. Bruce A. Thyer menyatakan dalam bukunya “*Quasi-Experimental Research Designs*” desain penelitian *Interrupted Time Series* (ITS) merupakan pendekatan utama untuk evaluasi kesejahteraan sosial dan kebijakan pemerintah dengan bentuk data tim series (Thyer, 2012). Dalam buku “*Public Program Evaluation: A Statistical Guide*”, Langbein dan Felbinger menjelaskan bahwa desain kuasi-eksperimental merupakan pendekatan evaluasi kebijakan yang digunakan ketika eksperimen murni (randomized experiment) tidak memungkinkan untuk diterapkan, terutama dalam konteks program publik dan kebijakan pemerintah. Pada desain ini, peneliti tidak melakukan pengacakan (random assignment) terhadap subjek penelitian, tetapi tetap berupaya mengidentifikasi hubungan kausal antara intervensi kebijakan dan hasil yang diamati. Kuasi-eksperimental bertujuan untuk menilai dampak suatu program dengan

memanfaatkan variasi waktu, kelompok, atau kondisi sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan, serta menggunakan teknik statistik untuk mengendalikan faktor-faktor luar yang berpotensi memengaruhi hasil. Menurut Langbein dan Felbinger, pendekatan ini sangat relevan dalam evaluasi program publik karena kebijakan sering kali diterapkan secara luas dan tidak memungkinkan pemilihan kelompok perlakuan dan kontrol secara acak (Langbein & Felbinger, 2012).

Metode ITS ini menilai perubahan tren dan tingkat (level) variabel terikat sebelum dan sesudah waktu intervensi yang ditentukan. Dengan demikian, ITS memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan apakah suatu intervensi memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku atau fenomena sosial tertentu (Bernal *et al.*, 2017). Keunggulan utama dari metode ITS adalah kemampuannya dalam mengontrol tren historis dari suatu fenomena, sehingga dapat memisahkan antara efek intervensi dan kecenderungan alami dari data tersebut. Hal ini sangat penting dalam konteks kebijakan publik karena tidak semua perubahan yang terjadi setelah intervensi dapat dikaitkan langsung dengan intervensi itu sendiri. ITS memberikan estimasi yang lebih objektif mengenai dampak kebijakan melalui perbandingan tren data sebelum dan sesudah intervensi (Linden, 2015). Secara teknis, analisis ITS dapat dilakukan dengan pendekatan regresi linear yang memasukkan variabel waktu, dummy intervensi, dan variabel waktu setelah intervensi atau bisa dengan interaksi antara keduanya. Model ini umumnya mengadopsi format regresi segmented linear dengan rumus:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Time_t + \beta_2 Intervention_t + \beta_3 Time After Intervention_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

Di mana β_0 menunjukkan tingkat awal variabel dependen, β_1 mewakili tren sebelum intervensi, β_2 mewakili perubahan level segera setelah intervensi, dan β_3 menunjukkan perubahan tren setelah intervensi. ITS sering digunakan dalam bidang kesehatan, kebijakan sosial, dan ekonomi, terutama ketika eksperimen acak tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan etika atau logistik. Dalam studi kebijakan sosial, ITS telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk mengevaluasi dampak program seperti vaksinasi massal, pengurangan konsumsi rokok, atau program bantuan sosial terhadap indikator kesejahteraan masyarakat (Turner *et al.*,

2025). Dengan begitu, ITS relevan digunakan dalam penelitian pengentasan kemiskinan, untuk mengukur dampak bantuan sosial seperti PKH terhadap tingkat kemiskinan dalam kurun waktu tertentu. Dengan menganalisis data BPS yang dikumpulkan secara periodik, peneliti dapat mengidentifikasi apakah adanya intervensi pemerintah melalui bantuan sosial menyebabkan perubahan signifikan dalam tingkat kemiskinan setelah diluncurkan. Hal ini memberikan informasi berbasis bukti kepada pembuat kebijakan bantuan sosial yang dijalankan.

Mengingat pada umumnya penelitian yang menggunakan data time series dibutuhkan data yang relatif panjang. Namun, persyaratan data penggunaan metode *Interrupted Time Series* tidak ada batasan pasti mengenai jumlah titik data karena kekuatannya bergantung pada berbagai faktor lain, termasuk distribusi titik data sebelum dan sesudah intervensi, variabilitas dalam data, kekuatan efek, dan keberadaan efek perancu seperti musim (Bernal *et al.*, 2017). Tetapi menurut Hategeka *et al.*, (2020) dan Turner *et al.*, (2019) merekomendasikan bahwa penggunaan metode ITS setidaknya ada tiga titik data sebelum dan sesudah intervensi yang dimasukkan dalam tinjauannya. Dan penting bagi peneliti untuk memastikan konsistensi data dan mempertimbangkan faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi hasil, seperti krisis ekonomi atau bencana alam yang terjadi dalam periode analisis (Kontopantelis *et al.*, 2015).

Metode ITS merupakan alat analisis yang kuat dalam evaluasi dampak kebijakan, dengan mempertimbangkan kelebihan dan keterbatasannya, model ITS termasuk untuk menilai efektivitas dampak bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan. Penggunaan ITS dalam konteks Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran empiris mengenai apakah intervensi pemerintah melalui bansos telah memberikan hasil yang nyata dalam pengentasan kemiskinan, sehingga mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

2.1.5 Variabel Kontrol

Variabel kontrol berfungsi untuk menjelaskan faktor-faktor ekonomi makro yang turut memengaruhi tingkat kemiskinan, di luar variabel utama yaitu bantuan sosial.

Variabel kontrol digunakan untuk memastikan bahwa pengaruh bantuan sosial terhadap penurunan kemiskinan tidak bias akibat variabel lain yang juga berperan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Bernal *et al.*, 2018). Adapun variabel kontrol dalam penelitian ini meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan inflasi, yang keduanya merupakan indikator penting dalam analisis ekonomi makro dan pembangunan daerah.

2.1.5.1 PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator utama yang menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Secara konseptual, PDRB per kapita menunjukkan rata-rata output atau pendapatan yang dihasilkan per individu dalam suatu daerah selama periode tertentu (Mankiw, 2021). Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan standar hidupnya. Dalam teori ekonomi makro, Keynes (1936) menjelaskan bahwa peningkatan output dan pendapatan masyarakat akan mendorong kenaikan permintaan agregat dan konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Todaro & Smith (2020) dalam bukunya edisi ke-13 yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mampu mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

Menurut perspektif empiris, Hidayat & Woyanti (2021) menegaskan bahwa peningkatan PDRB per kapita berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan karena semakin besar pendapatan per kapita suatu daerah, semakin tinggi pula daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Namun, efek ini dapat bervariasi tergantung pada pemerataan distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, PDRB per kapita digunakan sebagai variabel kontrol untuk menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi daerah turut memengaruhi perubahan tingkat kemiskinan di luar pengaruh bantuan sosial. Penelitian terdahulu juga menggunakan variabel PDRB per kapita sebagai variabel kontrol yang banyak ditemukan dalam studi-studi ekonomi makro walau tidak secara langsung meneliti kemiskinan. namun hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita memiliki

pengaruh penting terhadap kinerja ekonomi dan masyarakat secara umum. seperti studi oleh Decta (2013) yang meneliti pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur yang menjadikan pertumbuhan ekonomi salah satunya PDRB per kapita sebagai variabel kontrol.

Dalam penelitian ekonomi regional, PDRB atas dasar harga konstan sering digunakan karena mampu menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi). PDRB riil per kapita merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam suatu daerah setelah memperhitungkan jumlah penduduk. Indikator ini sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat serta kemampuan perekonomian daerah dalam menghasilkan pendapatan bagi penduduknya. Secara matematis, PDRB riil per kapita dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PDRB\ Riil\ per\ Kapita = \frac{PDRB\ ADHK}{Jumlah\ Penduduk} \quad (2)$$

2.1.5.2 Inflasi

Inflasi merupakan variabel makroekonomi penting yang mencerminkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu perekonomian (Samuelson & Nordhaus, 2010). Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah, sehingga memperburuk kondisi kemiskinan. Sebaliknya, inflasi yang stabil dalam batas moderat dapat menjadi tanda adanya aktivitas ekonomi yang sehat dan peningkatan permintaan agregat (Mankiw, 2021). Menurut teori Keynesian, inflasi memiliki hubungan yang kompleks dengan kemiskinan. Dalam jangka pendek, peningkatan permintaan agregat dapat mendorong inflasi sekaligus meningkatkan kesempatan kerja (Keynes, 1936). Namun dalam jangka panjang, inflasi yang tidak terkendali akan menggerus nilai riil pendapatan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat miskin. Secara matematis, tingkat inflasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Inflasi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\% \quad (3)$$

Keterangan :

IHK_t : Indeks Harga Konsumen pada periode waktu berjalan

IHK_{t-1} : Indeks Harga Konsumen pada periode sebelumnya

Hasil penelitian Sukirno (2011) dalam bukunya menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi secara signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan, terutama di daerah yang memiliki struktur pendapatan tidak merata. Temuan ini diperkuat oleh (Susanto & Pangesti (2021) yang menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia karena tingginya harga kebutuhan pokok menurunkan kemampuan konsumsi rumah tangga miskin. Oleh sebab itu, variabel inflasi dijadikan kontrol dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa perubahan tingkat kemiskinan tidak semata-mata dipengaruhi oleh bantuan sosial, tetapi juga mempertimbangkan kondisi makroekonomi yang lebih luas. Penelitian terdahulu juga menggunakan variabel inflasi sebagai variabel kontrol yang banyak ditemukan dalam studi-studi ekonomi makro walau tidak secara langsung meneliti kemiskinan. namun hal ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh penting terhadap kinerja ekonomi dan masyarakat secara umum. seperti studi oleh Prasaja (2013) yang melakukan studi pengaruh investasi asing, jumlah penduduk dan inflasi terhadap pengangguran terdidik di Jawa Tengah Periode 1980-2011 dengan inflasi sebagai variabel kontrol dalam studi, dan studi oleh Chow (2013) yang melakukan studi faktor penentu pengangguran di Bangladesh pada tahun 2000-2011. Variabel kontrol dalam studi tersebut salah satunya adalah tingkat inflasi sementara variabel dikontrol yaitu tingkat pengangguran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Judul, Penulis, Tahun	Variabel	Metode	Hasil
<i>Program Keluarga Harapan: Can It Reduce Poverty and Increase Welfare in Indonesia?</i> , Resina et al., (2022)	Variabel Bebas: PKH Variabel Terikat: Kemiskinan, Kesejahteraan	Kuantitatif, SEM-PLS	PKH berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dan positif signifikan terhadap kesejahteraan.
<i>Effects of the free healthcare policy on maternal and child health in Burkina Faso: a nationwide evaluation using interrupted time-series analysis</i> , (Ilboudo & Siri, 2023)	Variabel Bebas: Kebijakan penghapusan biaya layanan kesehatan (user fee removal) atau layanan kesehatan gratis. Variabel Terikat: Kesehatan ibu dan anak	Kuantitatif; Interrupted Time Series (ITS) dengan regresi Poisson bersyarat	Kebijakan layanan kesehatan gratis meningkatkan signifikan konsultasi anak di bawah lima tahun. Mortalitas malaria berat anak menurun signifikan. Berdampak terhadap layanan persalinan, operasi sesar, dan kematian bayi, meskipun tidak seluruhnya signifikan.
<i>The Impact of Social Assistance Programs on Population Health: A Systematic Review of Research in High-Income Countries</i> , (Shahidi et al., 2019)	Variabel Bebas: Bantuan sosial Variabel Terikat: Status kesehatan, ketimpangan kesehatan, dan status sosial ekonomi	Systematic Review	Bantuan sosial meningkatkan daya beli dan kesejahteraan material, namun banyak penerima masih memiliki kondisi kesehatan lebih buruk dibanding non-penerima, menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas kebijakan bantuan sosial. Program Bantuan Sosial mungkin tidak terlalu cocok menggunakan metode Systematic Review lebih baik

Judul, Penulis, Tahun	Variabel	Metode	Hasil
			menggunakan metode seperti <i>Interrupted Time Series (ITS)</i>
<i>Analysing Interrupted Time Series with a Control</i> , (Tropical et al., 2019)	Variabel Bebas: Intervensi kebijakan kesehatan (sebelum dan sesudah intervensi). Variabel Terikat: Insidensi penyakit (misalnya bakteremia gram-negatif dan diare rotavirus). Variabel kontrol: Seri kontrol yang tidak terpapar intervensi namun berbagi tren yang sama.	Interrupted Time Series dengan Control Series	Penggunaan control series mampu mengurangi bias tren dan confounding sehingga estimasi dampak kebijakan kesehatan populasi menjadi lebih akurat dibanding ITS tanpa kontrol.
<i>Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Mengurangi Kemiskinan</i> , Syata, (2025)	Variabel Bebas: Bantuan Sosial (PKH, BLT, subsidi) Variabel Terikat: Kemiskinan	Studi pustaka / literatur	Bansos efektif meningkatkan daya beli dan memutus rantai kemiskinan, tetapi menghadapi tantangan dalam akurasi distribusi dan kesadaran penerima.
<i>Pengaruh Bantuan Sosial BPNT dan PKH terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan</i> , Fadhli & Nazila, (2023)	Variabel Bebas: BPNT, PKH Variabel Terikat: Kemiskinan	Kuantitatif, regresi berganda	BPNT berpengaruh negatif, PKH positif terhadap pengurangan kemiskinan; bersama-sama signifikan dengan kontribusi 53,3%.

Judul, Penulis, Tahun	Variabel	Metode	Hasil
<i>Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan</i> , Lubis & Zubaidah, (2020)	Variabel Bebas: Program Keluarga Harapan (PKH) Variabel Terikat: Kemiskinan	Kuantitatif deskriptif, survei	Program PKH efektif (input 72%, proses 71%, output 77%), namun menghadapi hambatan koordinasi dan jumlah bantuan yang belum mencukupi.
<i>Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia</i> , Salsabila et al., (2024)	Variabel Bebas: Bantuan Sosial (Bansos). Variabel Terikat: Kemiskinan di Indonesia.	Studi Kepustakaan (<i>Library Study</i>) dengan data sekunder.	Bansos belum sepenuhnya efektif dalam memberantas kemiskinan di Indonesia. Dan program, PKH yang paling efektif dengan kendala terbesar pada data yang tidak akurat dan distribusi yang tidak tepat sasaran.
<i>The impact of alcohol control policy on assaults and sexual assaults in Lithuania: An interrupted time-series analysis</i> , Miščikienė et al., (2025)	Variabel Bebas: Kebijakan kontrol alkohol (Pajak, Harga Minimum, Jam Penjualan, dsb.) di Lithuania. Variabel Terikat: Kasus penyerangan (<i>assaults</i>) dan pelecehan seksual (<i>sexual assaults</i>).	Interrupted Time Series (ITS)	Kebijakan kontrol alkohol berdampak signifikan dalam mengurangi angka penyerangan dan pelecehan seksual. Hasil ini menunjukkan ITS efektif menilai dampak kebijakan publik yang kompleks pada isu sosial.
<i>Evaluasi Dampak terhadap Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Tulungagung</i> . Sujoko et al. (2022)	Variabel Bebas: Pemberlakuan Perda No. 4 Tahun 2013 (Perlindungan & Pemberdayaan UMKM). Variabel Terikat: Pertumbuhan Ekonomi,	Interrupted Time Series (ITS) (Regresi Tersegmentasi) dengan data tahunan.	Perda 4/2013 tidak berdampak signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menurunkan kemiskinan. Kegagalan diakibatkan oleh

Judul, Penulis, Tahun	Variabel	Metode	Hasil
	Pengangguran, Kemiskinan.		implementasi yang tidak optimal.
<i>Dampak Kebijakan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Terhadap Ekspor Nikel Olahan: Interrupted Time Series Analysis.</i> Ananda & Wahyuni (2024)	Variabel Bebas: Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel (2014 dan 2020), Relaksasi Ekspor Bijih Nikel (2017). Variabel Terikat: Ekspor Nikel Olahan.	Interrupted Time Series (ITS)	Larangan Ekspor 2014: Menurunkan volume ekspor nikel olahan pada bulan pertama. Larangan Ekspor 2020: Meningkatkan tren volume ekspor nikel olahan Indonesia (terjadi hilirisasi).

Penelitian oleh Resina *et al.* (2022) menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan pelaksanaan PKH mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan variabel independen, yaitu bantuan sosial PKH sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengurangi kemiskinan, namun penelitian ini melengkapinya dengan memasukkan variabel kontrol ekonomi (PDRB per kapita dan inflasi) agar hasilnya lebih komprehensif.

Sementara itu, penelitian yang menggunakan metode *Interrupted Time Series (ITS)* seperti penelitian oleh Ilboudo dan Siri, (2023) menganalisis dampak kebijakan layanan kesehatan gratis bagi perempuan dan anak di Burkina Faso. Studi ini bertujuan mengevaluasi perubahan penggunaan layanan kesehatan, outcome kesehatan, serta beban biaya rumah tangga setelah implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan biaya layanan kesehatan secara signifikan meningkatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan, termasuk kunjungan kesehatan anak, persalinan dengan tenaga medis, serta kunjungan antenatal. Selain itu, kebijakan tersebut terbukti mampu menurunkan mortalitas akibat malaria berat pada anak di bawah lima tahun dan mengurangi sebagian beban biaya rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh Shahidi *et al.*, (2019) mengkaji

dampak program bantuan sosial terhadap kesehatan masyarakat melalui metode *systematic review* pada negara berpendapatan tinggi. Studi ini berangkat dari argumen bahwa faktor sosial ekonomi merupakan determinan utama kesehatan, sehingga kebijakan bantuan sosial berperan penting dalam mengurangi ketimpangan kesehatan, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan material dan terdapat saran penelitian selanjutnya bahwa lebih baik menggunakan metode seperti *Interrupted Time Series* (ITS). Pendekatan metodologi pada penelitian tersebut relevan karena sama-sama menganalisis perubahan tren sebelum dan sesudah intervensi kebijakan. Dengan demikian, jurnal pertama menjadi rujukan substantif terkait hubungan antara bantuan sosial dan kemiskinan, sedangkan jurnal kedua menjadi rujukan metodologis yang memperkuat validitas penggunaan model ITS dalam penelitian ini.

2.3 Kerangka Pemikiran

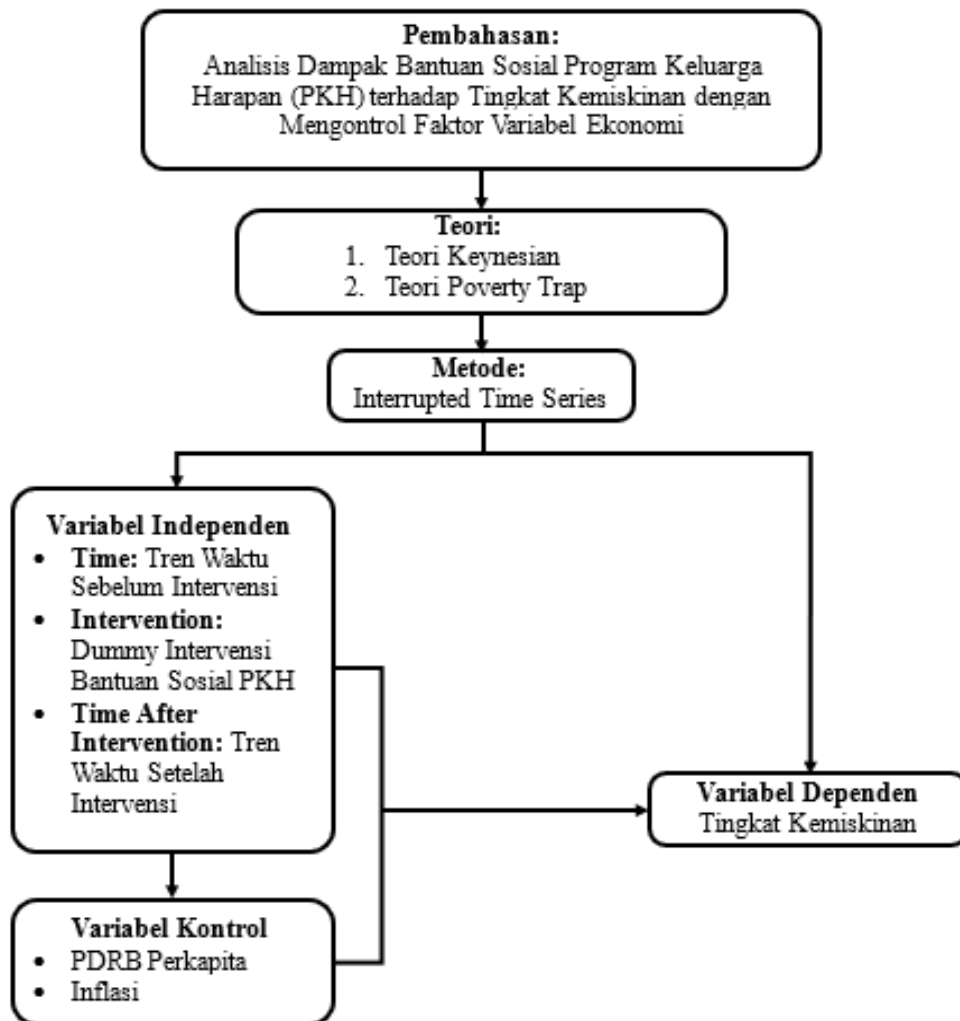
Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur berdasarkan garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2023). Tingginya tingkat kemiskinan mencerminkan rendahnya kesejahteraan masyarakat serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*) yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Bantuan ini mensyaratkan pemenuhan komitmen di bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan konsumsi jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi modal manusia.

Dalam perspektif teori Keynesian, intervensi pemerintah melalui transfer sosial dapat meningkatkan pendapatan disposabel rumah tangga miskin, mendorong konsumsi, serta memperkuat permintaan agregat (Mankiw, 2019). Peningkatan konsumsi tersebut berpotensi menurunkan kemiskinan melalui perbaikan daya beli. Sementara itu, teori *poverty trap* menjelaskan bahwa kemiskinan dapat bersifat

struktural akibat rendahnya investasi pada pendidikan dan kesehatan, sehingga diperlukan intervensi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi (Todaro & Smith, 2015). PKH dirancang untuk menjawab kedua mekanisme tersebut, yakni melalui peningkatan konsumsi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di Provinsi Lampung, implementasi PKH dimulai pada tahun 2011 dan diposisikan sebagai titik intervensi dalam penelitian ini. Untuk menguji dampaknya, digunakan metode *Interrupted Time Series* (ITS), yang mampu mengidentifikasi perubahan tingkat (*level change*) dan perubahan tren (*slope change*) sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan (Bernal *et al.*, 2017). Selain PKH, dinamika kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor makroekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini memasukkan PDRB per kapita dan inflasi sebagai variabel kontrol. PDRB per kapita mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah yang secara teoritis berkorelasi negatif dengan kemiskinan, karena peningkatan pendapatan rata-rata dapat memperluas kesempatan kerja dan kesejahteraan (Todaro & Smith, 2015), dan sejalan dengan oleh Manalu *et al.*, (2024) menyebut bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, inflasi memengaruhi daya beli, terutama bagi rumah tangga miskin yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan pokok; kenaikan inflasi dapat meningkatkan risiko kemiskinan (Mankiw, 2019). Penelitian tentang pengaruh inflasi dan PDRB terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan (Haritsah, 2024).

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan PKH sebagai variabel intervensi utama yang secara teoritis memengaruhi kemiskinan melalui mekanisme peningkatan konsumsi dan investasi modal manusia, sementara PDRB per kapita dan inflasi dikendalikan untuk memperoleh estimasi dampak yang lebih akurat. Pengujian empiris dilakukan menggunakan pendekatan *Interrupted Time Series* untuk menilai perubahan pola kemiskinan di Provinsi Lampung setelah implementasi PKH.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.

2.4 Rumusan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, studi empiris dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga tren tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung menurun sebelum intervensi bantuan sosial PKH diterapkan.
2. Diduga intervensi bantuan sosial PKH berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung ketika intervensi bantuan sosial PKH diterapkan.

3. Diduga tren tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung lebih menurun setelah intervensi bantuan sosial PKH diterapkan dengan mengontrol variabel ekonomi.
4. Diduga variabel kontrol (PDRB per Kapita) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.
5. Diduga variabel kontrol (Inflasi) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Pendekatan, Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuasi-eksperimental. Fokus penelitian adalah menganalisis dampak bantuan sosial PKH terhadap tingkat kemiskinan dengan membandingkan pola data sebelum dan sesudah adanya intervensi kebijakan/program menggunakan metode *Interrupted Time Series* (ITS) yang berdasarkan data deret waktu. Metode ITS dipilih karena mampu mengidentifikasi perubahan signifikan baik pada tren (trend) maupun level suatu variabel setelah intervensi, sekaligus mengontrol kecenderungan alami yang terjadi tanpa kebijakan. Dengan demikian, metode ini dapat memberikan gambaran kausalitas yang lebih kuat meskipun tidak menggunakan desain eksperimental murni. Dalam penelitian ini, intervensi kebijakan yang dimaksud adalah implementasi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai pada tahun 2011 di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan ITS yaitu tidak hanya membandingkan kondisi kemiskinan sebelum dan sesudah program, tetapi juga menganalisis tren jangka panjang untuk menilai efektivitas dampak bantuan sosial PKH sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa deret waktu (time series) tahunan dengan rentang tahun 2001 hingga 2024 di Provinsi Lampung. Rentang waktu penelitian mencakup periode sebelum intervensi (2001-2010) dan sesudah intervensi (2011-2024) dan periode 2011 menjadi titik intervensi sesuai dengan kebutuhan analisis model ITS. Tahun 2011 ditetapkan sebagai titik intervensi (cut-off point) dalam model karena pada periode tersebut bantuan sosial PKH mulai diimplementasikan secara masif di Lampung yang secara normatif tertuang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan

Keputusan Gubernur No. 82 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung Tahun 2011 (Jdih.lampungprov, 2011; Undang-Undang Republik Indonesia, 2011).

Mengingat pada umumnya penelitian yang menggunakan data time series dibutuhkan data yang relatif panjang. Namun, persyaratan data penggunaan metode *Interrupted Time Series* tidak ada batasan pasti mengenai jumlah titik data karena kekuatannya bergantung pada berbagai faktor lain, termasuk distribusi titik data sebelum dan sesudah intervensi, variabilitas dalam data, kekuatan efek, dan keberadaan efek perancu seperti musim (Bernal *et al.*, 2017). Tetapi menurut Hategeka *et al.*, (2020) dan Turner *et al.*, (2019) merekomendasikan bahwa penggunaan metode ITS setidaknya ada tiga titik data sebelum dan sesudah intervensi yang dimasukkan dalam tinjauannya. Adapun Gujarati dan Porter menjelaskan bahwa dalam analisis ekonometrika, penggunaan data time series dengan jumlah observasi yang relatif terbatas masih dapat dilakukan selama model yang digunakan mampu menjelaskan hubungan antarvariabel secara teoritis dan empiris (Gujarati & Porter, 2010). Selain itu, menurut Greene, (2012), penelitian ekonometrika yang menggunakan data tahunan seringkali memiliki jumlah observasi yang lebih kecil dibandingkan data bulanan atau kuartalan. Oleh karena itu, penggunaan jumlah observasi sekitar 20-30 periode masih dianggap memadai untuk melakukan estimasi model regresi, selama asumsi model dapat dipenuhi dan data mencerminkan fenomena yang diteliti.

Badan Pusat Statistik Secara historis mulai menyajikan data kemiskinan tahunan secara konsisten mulai pada tahun 2000, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) sebagai standar nasional dalam menghitung kemiskinan, sehingga data yang dihasilkan memiliki keterbandingan antarwaktu yang memadai untuk analisis deret waktu jangka panjang (Badan Pusat Statistik, 2025a). Dimulainya penghitungan kemiskinan tahunan ini bersamaan dengan agenda global Millenium Development Goals (MDGs) yang menjadi kerangka kerja pembangunan internasional sampai 2015, termasuk target penurunan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan sosial (Bappenas, 2013), yang menjadikan tahun 2000 sebagai basis waktu referensial yang relevan untuk evaluasi

kebijakan sosial di Indonesia terhadap data kemiskinan, tetapi pada periode 1998-2000, perekonomian Indonesia masih berada dalam tekanan yang cukup berat, ditandai dengan tingginya inflasi, melemahnya nilai tukar, meningkatnya pengangguran, serta lonjakan angka kemiskinan sebagai dampak langsung dari krisis. Kondisi tersebut menyebabkan data sosial-ekonomi pada periode sebelum 2001 masih sangat dipengaruhi oleh gejolak krisis dan belum mencerminkan kondisi keseimbangan ekonomi yang lebih normal.

Tahun 2001 dipilih sebagai awal periode observasi dalam penelitian ini karena dianggap sebagai fase awal pemulihan ekonomi yang relatif lebih stabil pascakrisis ekonomi nasional 1997-1998. Memasuki tahun 2001, stabilitas makroekonomi mulai menunjukkan perbaikan yang lebih konsisten, sehingga dinamika kemiskinan yang terjadi setelahnya lebih merepresentasikan kondisi struktural dan respons kebijakan pemerintah dibandingkan efek guncangan krisis semata. Dengan demikian, pemilihan tahun 2001 sebagai titik awal observasi dinilai lebih relevan secara metodologis karena memberikan dasar analisis yang lebih stabil untuk mengamati tren kemiskinan jangka panjang sehingga tidak mengganggu hasil data pengamatan dalam menganalisis dampak kebijakan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan terhadap perubahan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Maka demikian penelitian ini mengambil observasi data kemiskinan dari tahun 2001 sampai 2024 untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kemiskinan sebelum dan sesudah implementasi PKH.

3.2 Teknik, Deskripsi dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik dokumentasi dari sumber resmi dan terverifikasi. Data dikumpulkan dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial Provinsi Lampung, Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam bentuk publikasi tahunan. Data utama yang dikumpulkan meliputi: tingkat kemiskinan, PDRB riil per kapita, dan inflasi. Semua variabel tersebut dikumpulkan dalam bentuk data time series periode tahun 2001 sampai 2024 yang disesuaikan. Seluruh data

dikompilasi dalam format tabulasi untuk diolah dan dianalisis secara statistik menggunakan perangkat lunak seperti STATA17, dan Excel.

Tabel 3.1 Deskripsi Variabel

Nama Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
Tingkat Kemiskinan	Y	Persen	Badan Pusat Statistik
Variabel Intervensi: 1. Tren Waktu 2. Dummy Intervensi 3. Tren Waktu setelah Intervensi	1. T 2. X 3. TA	1. Angka Urutan Tahun 2. Dummy (0/1) 3. Angka Urutan Tahun	1. Data diolah Peneliti 2. Data diolah Peneliti 3. Data diolah Peneliti
PDRB Riil per Kapita	Z1	Ribu Rupiah	Badan Pusat Statistik
Inflasi	Z2	Persen	Badan Pusat Statistik

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel berfungsi untuk menjelaskan secara jelas pengertian dan batasan masing-masing variabel dalam penelitian agar dapat diukur secara empiris sesuai dengan kerangka konsep penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

3.3.1 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan variabel utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Secara konseptual, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum baik untuk konsumsi makanan maupun nonmakanan. Garis kemiskinan ditetapkan berdasarkan nilai rupiah minimum yang diperlukan untuk mencapai standar hidup layak. (Badan Pusat Statistik, 2023) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang diukur melalui pendekatan pengeluaran per kapita. Garis kemiskinan ditetapkan berdasarkan nilai rupiah minimum yang diperlukan untuk mencapai standar hidup layak, yang terdiri atas *Garis Kemiskinan Makanan (GKM)* dan *Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM)*.

Dalam penelitian ini, tingkat kemiskinan diukur berdasarkan persentase penduduk pada setiap tahun pengamatan yang berada di bawah garis kemiskinan yang diukur oleh BPS melalui indikator Headcount Index (P0), yaitu persentase penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan nasional (Badan Pusat Statistik, 2025a). Pengukuran dilakukan dalam satuan persen (%), dengan data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi resmi. Periode data yang digunakan mencakup tahun 2001 hingga 2024, sehingga memungkinkan analisis tren jangka panjang sebelum dan sesudah implementasi program bantuan sosial.

3.3.2 Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) didefinisikan sebagai intervensi kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*) yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin serta meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). World Bank, (2020c) mendefinisikan bantuan sosial sebagai transfer nonkontributif dari pemerintah kepada individu atau rumah tangga yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan kerentanan.

Dalam penelitian ini yang menggunakan metode *Interrupted Time Series (ITS)*, PKH diposisikan sebagai variabel intervensi kebijakan yang diukur berdasarkan waktu implementasinya di Provinsi Lampung, yaitu tahun 2011. Variabel ini tidak diukur berdasarkan besaran nominal bantuan, melainkan berdasarkan keberadaan kebijakan sebelum dan sesudah implementasi. Secara operasional, variabel PKH diukur menggunakan variabel dummy sebagai berikut:

- a. Nilai 0 : Periode sebelum implementasi PKH di Provinsi Lampung (tahun sebelum 2011)
- b. Nilai 1 : Periode setelah implementasi PKH di Provinsi Lampung (tahun 2011 dan sesudahnya)

Selain itu, dalam model *Interrupted Time Series*, variabel ini juga dikombinasikan dengan variabel waktu setelah intervensi (*time after intervention*) untuk mengukur

perubahan tren (slope change) pasca implementasi PKH. Dengan demikian, definisi operasional PKH dalam penelitian ini adalah variabel kebijakan berbentuk dummy yang merepresentasikan keberadaan intervensi bantuan sosial bersyarat sejak tahun 2011, yang digunakan untuk mengidentifikasi perubahan tingkat (level) dan perubahan tren (slope) tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

3.3.3 Variabel Intervensi

Variabel intervensi merepresentasikan implementasi kebijakan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Lampung yang mulai dilaksanakan pada tahun 2011. Karena penelitian menggunakan metode *Interrupted Time Series (ITS)*, Namun demikian, secara teknis dalam model regresi, bantuan sosial PKH juga dapat dipahami sebagai variabel independen, yaitu variabel yang diduga memengaruhi perubahan pada variabel dependen (tingkat kemiskinan).

Variabel intervensi dalam ITS, tidak diukur berdasarkan besaran nominal bantuan, melainkan berdasarkan keberadaan kebijakan sebelum dan sesudah implementasi di Provinsi Lampung pada tahun 2011. Oleh karena itu, variabel ini dioperasionalkan dalam tiga komponen utama, yaitu tren waktu (*time*), dummy intervensi (*intervention dummy*), dan tren setelah intervensi (*time after intervention*) yang secara bersama-sama membentuk variabel independen dalam model regresi deret waktu, yaitu:

1. Tren Waktu (*Time Trend*)

Variabel tren waktu merupakan variabel yang menunjukkan urutan waktu pengamatan dalam bentuk data tahunan. Variabel ini digunakan untuk menangkap tren tingkat kemiskinan sebelum adanya intervensi bantuan sosial PKH. Secara operasional, variabel ini diukur dengan memberi kode angka secara berurutan sesuai periode penelitian, sebagai berikut:

- a. Tahun pertama observasi = 1
- b. Tahun kedua = 2
- c. dan seterusnya hingga tahun terakhir pengamatan.

Variabel ini merepresentasikan perubahan tingkat kemiskinan setiap tahun sebelum intervensi.

2. Dummy Intervensi (*Intervention Dummy*)

Variabel dummy intervensi digunakan untuk menangkap perubahan tingkat (level change) yang terjadi segera ketika implementasi PKH pada tahun 2011. Secara operasional, variabel ini diukur sebagai berikut:

- a. Nilai 0 : periode sebelum implementasi PKH (tahun < 2011)
- b. Nilai 1 : periode setelah implementasi PKH (tahun ≥ 2011)

Variabel ini mengukur apakah terdapat perubahan langsung pada tingkat kemiskinan pada periode ketika kebijakan diberlakukan.

3. Tren Waktu Setelah Intervensi (*Time After Intervention*)

Variabel tren waktu setelah intervensi digunakan untuk mengukur perubahan kemiringan tren (slope change) tingkat kemiskinan setelah implementasi PKH. Secara operasional, variabel ini diukur sebagai:

- a. Nilai 0 : untuk seluruh periode sebelum 2011
- b. Nilai bertambah secara berurutan sejak tahun 2011 (seperti, 1 untuk 2011, 2 untuk 2012, dan seterusnya)

Variabel ini menunjukkan apakah laju penurunan atau peningkatan kemiskinan berubah setelah adanya intervensi kebijakan (Penfold, 2023).

3.3.4 Variabel Kontrol (Z_1): PDRB Riil per Kapita

PDRB riil per kapita merupakan variabel kontrol yang digunakan untuk menangkap pengaruh kondisi ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan. Secara konseptual, PDRB riil per kapita menggambarkan rata-rata output ekonomi yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam suatu wilayah, dengan memperhitungkan nilai riil atau harga konstan. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), PDRB riil per kapita merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, serta digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga (inflasi). Dengan demikian, PDRB riil per kapita tidak hanya menggambarkan pertumbuhan

ekonomi, tetapi juga memberikan gambaran riil mengenai perubahan daya beli dan standar hidup penduduk di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai PDRB riil per kapita, semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga secara teoritis diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam penelitian ini, PDRB riil per kapita diukur dalam satuan rupiah (Rp) per kapita atas dasar harga konstan. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi “*Lampung dalam Angka dan PDRB Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha*”. Periode data yang digunakan mencakup tahun 2001 hingga 2024 agar konsisten dengan rentang waktu variabel lainnya.

3.3.5 Variabel Kontrol (Z_2): Inflasi

Inflasi digunakan sebagai variabel kontrol kedua dalam penelitian ini untuk merepresentasikan dinamika harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Secara konseptual, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), inflasi menggambarkan kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat secara terus-menerus, yang mencerminkan penurunan daya beli uang. Tingkat inflasi yang tinggi cenderung menurunkan daya beli masyarakat miskin, karena pendapatan mereka tidak meningkat secara proporsional terhadap kenaikan harga. Oleh karena itu, inflasi berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan secara tidak langsung. Dalam penelitian ini, inflasi diukur berdasarkan persentase perubahan tahunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Data inflasi diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dari laporan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Lampung, dengan periode observasi dari 2001 hingga 2024.

3.4 Metode Analisis Data

Metode Analisis data adalah tahapan pengolahan dan penyederhanaan data sehingga hasil penelitian dapat ditafsirkan dengan lebih jelas. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola dan hubungan antarvariabel yang diteliti agar

analisis dapat dilakukan secara akurat. Penelitian ini menerapkan metode *Interrupted Time Series* (ITS) guna menilai pengaruh intervensi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga metode tersebut sesuai digunakan dalam evaluasi kebijakan publik, termasuk program bantuan sosial.

3.4.1 Pengolahan Awal Data Time Series ITS

Data diinput dan dibersihkan dalam perangkat lunak seperti Excel. Tahap ini termasuk menyusun urutan waktu, konversi data dummy intervensi, dan urutan waktu setelah intervensi.

3.4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian sebelum dilakukan estimasi model *Interrupted Time Series* (ITS). Analisis ini meliputi perhitungan nilai rata-rata (mean), median, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari seluruh variabel penelitian, yaitu tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, variabel intervensi PKH (tren waktu, dummy intervensi, dan tren waktu setelah intervensi), serta variabel kontrol berupa PDRB per kapita dan inflasi. Statistik deskriptif bertujuan untuk melihat pola awal dan sebaran data selama periode 2001-2024 sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut.

3.4.3 Analisis Model Interrupted Time Series

Penelitian ini menggunakan metode *Interrupted Time Series* (ITS) sebagai desain kuasi-eksperimental untuk mengevaluasi dampak implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Desain ini digunakan ketika peneliti tidak memiliki kelompok kontrol, sehingga evaluasi kebijakan dilakukan dengan membandingkan pola data sebelum dan sesudah intervensi dalam suatu rangkaian waktu.

Secara konseptual, metode ITS bertujuan untuk mengidentifikasi apakah suatu kebijakan menimbulkan perubahan signifikan pada variabel yang diamati, baik dalam bentuk perubahan tingkat (level) maupun perubahan tren (slope). Perubahan level menggambarkan dampak langsung kebijakan pada saat intervensi mulai diterapkan, sedangkan perubahan tren menunjukkan perubahan arah atau kecepatan perkembangan variabel setelah kebijakan berjalan, sehingga metode cocok untuk evaluasi kebijakan publik seperti bantuan sosial (Langbein & Felbinger, 2012). Secara teknis, model ITS yang digunakan melibatkan beberapa variabel:

- A. Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan tahunan (dalam persen).
- B. Variabel independen utama mencakup variabel intervensi:
 - 1) *Time*: waktu observasi tahunan (2001-2024), sebagai tren alami untuk menangkap tren tingkat kemiskinan sebelum intervensi,
 - 2) *Intervention*: variabel dummy (0 untuk sebelum tahun 2011, 1 untuk tahun 2011 dan seterusnya),
 - 3) *TimeAfterIntervention*: tren waktu setelah intervensi dimulai.
- C. Variabel kontrol mencakup: PDRB per kapita, dan tingkat inflasi, yang berfungsi untuk menstabilkan pengaruh eksternal terhadap variabel dependen.

3.4.4 Estimasi Model Regresi ITS

Model Interrupted Time Series (ITS) dalam penelitian ini diestimasi menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS) yang merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam model segmented regression pada ITS (Turner *et al.*, 2021), metode OLS digunakan karena mampu menghasilkan estimator yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) apabila asumsi klasik terpenuhi karena OLS memiliki sifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) ketika asumsi klasik terpenuhi. Melalui metode ini, hubungan antara variabel dependen (tingkat kemiskinan) dan variabel independen yang merepresentasikan intervensi kebijakan dapat diukur secara kuantitatif. Model regresi yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 T_t + \beta_2 X_t + \beta_3 TA_t + \beta_4 Z_{1t} + \beta_5 Z_{2t} + \varepsilon_t \quad (4)$$

Dengan keterangan:

- Y_t : Tingkat kemiskinan pada waktu ke-t
 β_0 : Konstanta model
 $\beta_1 - \beta_5$: Koefisien Regresi
 T_t : Time_t (tren waktu tahun ke-t (2001-2024) tahun ke-1, ke-2, dst.)
 X_t : Intervention_t (variabel dummy 0 = sebelum tahun 2011, 1 = dimulai tahun 2011)
 TA_t : Time After Intervention_t, tren waktu setelah intervensi (tahun ke-1,2 dst dimulai tahun 2011)
 Z_{1t} : PDRB per Kapita_t (Variabel kontrol)
 Z_{2t} : Inflasi_t, (Variabel kontrol)
 ε_t : Error Term

Makna masing-masing koefisien adalah sebagai berikut:

- a. β_0 (constant) : menunjukkan tingkat kemiskinan pada awal periode pengamatan (tahun 2001).
- b. β_1 (pre-intervention trend) : menunjukkan perubahan tren tingkat kemiskinan pada periode sebelum intervensi.
- c. β_2 (level change) : mengukur perubahan langsung tingkat kemiskinan pada saat intervensi dimulai (tahun 2011).
- d. β_3 (trend change) : mengukur perubahan laju tren kemiskinan setelah intervensi dibandingkan dengan tren sebelumnya.
- e. β_4 dan β_5 : mengukur pengaruh variabel kontrol, yaitu PDRB per kapita dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan.

Dalam model ITS dua komponen utama yang diamati, yaitu perubahan level (level change) dan perubahan tren (trend change) setelah adanya intervensi untuk mengetahui dampak intervensinya (Bernal *et al.*, 2017). Pengujian signifikansi parameter dilakukan menggunakan uji t untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2)

digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan selama periode penelitian.

Dengan spesifikasi model tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi secara kuantitatif apakah intervensi PKH menimbulkan perubahan signifikan pada tingkat maupun tren kemiskinan di Provinsi Lampung setelah mengendalikan faktor makroekonomi.

3.4.5 Uji Asumsi Klasik

Meskipun dalam model Interrupted Time Series berbasis data deret waktu asumsi yang paling krusial untuk diuji adalah autokorelasi, karena adanya potensi korelasi residual antarperiode penelitian tetap melakukan pengujian asumsi klasik lainnya (Bernal *et al.*, 2017), yang disesuaikan dengan karakteristik data ITS dengan variabel kontrol. Hal ini disebabkan model diestimasi menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS), sehingga untuk memperoleh estimator yang bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), diperlukan pengujian terhadap asumsi homoskedastisitas, tidak adanya multikolinearitas, serta normalitas residual. sebagaimana dijelaskan oleh Gujarati & Porter (2010), yaitu bahwa estimasi yang dihasilkan bersifat tidak bias, efisien, dan konsisten. Pelanggaran terhadap salah satu asumsi klasik dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak valid atau bias secara statistik.

3.4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual pada model regresi terdistribusi secara normal atau tidak (Gujarati & Porter, 2010). Model regresi yang baik mensyaratkan residualnya mengikuti distribusi normal, karena hal ini menjadi dasar validitas pengujian statistik (t-test dan F-test). Mengingat jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 24 ($n < 50$), maka uji normalitas dilakukan menggunakan Shapiro-Wilk Test yang secara empiris memiliki kekuatan uji paling tinggi untuk sampel kecil (Razali & Wah, 2011) Meskipun Jarque-Bera umum digunakan dalam analisis ekonometrika time series, uji tersebut bersifat asimtotik

dan lebih sesuai untuk sampel besar. Uji normalitas dilakukan menggunakan Shapiro-Wilk Test, dengan hipotesis pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. H_0 : Nilai probability $> 0,05$ ($\alpha = 5\%$), maka residual dianggap berdistribusi normal.
- b. H_a : Nilai probability $\leq 0,05$, maka residual tidak berdistribusi normal.

3.4.5.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan antar residual pada periode yang berbeda. Masalah autokorelasi sering muncul pada data runtut waktu (time series), di mana nilai pada periode tertentu dipengaruhi oleh nilai pada periode sebelumnya (Wooldridge, 2016). Jika autokorelasi terjadi, maka hasil estimasi tidak efisien karena varians kesalahan menjadi bias. Autokorelasi dapat disebabkan oleh spesifikasi model yang tidak tepat, kesalahan dalam manipulasi data, atau karena data yang tidak stasioner. Pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan Breusch-Godfrey (Lagrange Multiplier) LM Test. Hipotesis pengujiannya sebagai berikut:

- a. H_0 : Nilai Prob. Chi-Square $> 0,05$ ($\alpha = 5\%$), maka tidak terdapat autokorelasi.
- b. H_a : Nilai Prob. Chi-Square $\leq 0,05$, maka terdapat autokorelasi dalam model.

3.4.5.3 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas antar variabel intervensi dalam model ITS merupakan bersifat struktural yang sudah pasti terjadi, Damodar Gujarati menyatakan multikolinearitas dapat timbul karena adanya variabel yang berasal dari kombinasi variabel lain, seperti pada bentuk polinomial atau interaksi, yang dikenal sebagai multikolinearitas struktural (Gujarati & Porter, 2010). Penggunaan metode OLS menjadikan model ITS secara statistik setara dengan model regresi linear serta dengan memasukkan variabel kontrol untuk mengendalikan pengaruh faktor lain di luar intervensi yang dapat memengaruhi variabel dependen menyebabkan model memiliki lebih dari satu variabel independen (kontrol) sehingga berpotensi menimbulkan hubungan linear antar variabel penjelas. Oleh karena itu, pengujian multikolinearitas perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat korelasi

yang tinggi antar variabel independen dalam hal ini variabel kontrol yang dapat memengaruhi kestabilan estimasi koefisien regresi (Bernal *et al.*, 2017; Gujarati & Porter, 2010; Wooldridge, 2016). Masalah multikolinearitas dapat menyebabkan varian dari koefisien regresi membesar, sehingga hasil estimasi menjadi tidak efisien dan interpretasi koefisien menjadi tidak reliabel. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan nilai VIF, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. $VIF > 10$ menunjukkan adanya multikolinearitas tinggi.
- b. VIF antara 5-10 menunjukkan multikolinearitas sedang.
- c. $VIF < 5$ menunjukkan multikolinearitas rendah atau tidak ada masalah serius.

Model regresi yang baik adalah model yang memiliki nilai $VIF < 10$ untuk seluruh variabel bebasnya (Ghozali, 2018).

3.4.5.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian dari error atau residual antar pengamatan. Dalam model regresi yang baik, varians residual harus konstan (*homoskedastisitas*). Jika varians residual berbeda antar observasi, maka terjadi heteroskedastisitas, yang dapat menyebabkan estimasi parameter menjadi tidak efisien (Widarjono, 2018). Penelitian ini untuk menguji masalah heteroskedastisitas menggunakan metode *White*. Hipotesis yang digunakan dalam metode *White* adalah :

- a. H_0 : Nilai *Prob. Chi-Square* $> 0,05$, maka tidak terdapat heteroskedastisitas dan model dianggap homoskedastisitas.
- b. H_a : Nilai *Prob. Chi-Square* $< 0,05$, maka terdapat heteroskedastisitas.

3.4.6 Uji Hipotesis

3.4.6.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh satu variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013) dengan mengasumsikan bahwa seluruh variabel independen lainnya berada dalam kondisi konstan. Uji ini bertujuan mengukur kekuatan dan arah hubungan antarvariabel dalam model regresi. Penentuan signifikansi dilakukan dengan

melihat nilai probabilitas (p-value) atau t-hitung (statistik). Pada penelitian ini yang menggunakan uji satu arah, variabel independen dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, apabila nilai probabilitas (Sig.) lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau apabila nilai t-hitung $< -t$ -tabel untuk hipotesis satu arah negatif dan apabila nilai t-hitung $> t$ -tabel untuk hipotesis satu arah positif. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas (Sig.) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau apabila nilai t-hitung $> -t$ -tabel untuk hipotesis satu arah negatif dan apabila nilai t-hitung $< t$ -tabel untuk hipotesis satu arah positif, maka variabel independen dianggap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, hasil uji t ini menjadi dasar untuk menolak atau menerima hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian dengan model ITS ini adalah:

Hipotesis 1

$H_0 : \beta_1 \geq 0$, Tren tingkat kemiskinan tidak menurun sebelum intervensi bantuan sosial PKH diterapkan.

$H_a : \beta_1 < 0$, Tren tingkat kemiskinan menurun sebelum intervensi bantuan sosial PKH diterapkan.

Keterangan: Jika koefisien β_1 bernilai negatif dan signifikan, maka menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki tren menurun sebelum intervensi bantuan sosial PKH diterapkan.

Hipotesis 2

$H_0 : \beta_2 \geq 0$, Intervensi bantuan sosial tidak berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan ketika adanya intervensi bantuan sosial PKH.

$H_a : \beta_2 < 0$, Intervensi bantuan sosial berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan ketika adanya intervensi bantuan sosial PKH.

Keterangan: Jika koefisien β_2 bernilai negatif dan signifikan, maka menunjukkan terdapat perubahan level, yang berarti bahwa intervensi bantuan sosial PKH berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan pada periode ketika intervensi bantuan sosial PKH diterapkan.

Hipotesis 3

$H_0 : \beta_3 \geq 0$, Tren tingkat kemiskinan tidak lebih menurun setelah intervensi bantuan sosial PKH diterapkan.

$H_a : \beta_3 < 0$, Tren tingkat kemiskinan lebih menurun setelah intervensi bantuan sosial PKH diterapkan.

Keterangan: Jika koefisien β_3 bernilai negatif dan signifikan, maka menunjukkan terdapat perubahan tren (slope), yang berarti tren tingkat kemiskinan lebih menurun setelah intervensi bantuan sosial PKH diterapkan.

Hipotesis 4

$H_0 : \beta_4 \geq 0$, PDRB per kapita tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

$H_a : \beta_4 < 0$, PDRB per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Hipotesis 5

$H_0 : \beta_5 \leq 0$, Inflasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

$H_a : \beta_5 > 0$, Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

3.4.6.2 Uji Bersama-sama (Uji F)

Uji F atau uji bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Gujarati & Porter, 2010). Dengan kata lain, uji ini menguji keberartian model secara keseluruhan. Secara matematis, hipotesis uji F dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$, tidak ada pengaruh bersama-sama antara intervensi waktu, intervensi bantuan sosial, PDRB per kapita, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan.
- b. $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$, terdapat pengaruh bersama-sama antara variabel independen terhadap tingkat kemiskinan.

Uji dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (p-value) atau F-statistik yang dihasilkan oleh model regresi. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Jika F-statistik $>$ F-tabel atau p-value $<$ 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
- b. Jika F-statistik $<$ F-tabel atau p-value \geq 0,05, maka H_0 diterima, yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Hasil uji F yang signifikan dalam model *Interrupted Time Series* (ITS), menunjukkan bahwa kombinasi dari variabel intervensi (bantuan sosial), tren waktu, dan variabel kontrol (PDRB per kapita dan inflasi) secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi perubahan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Dengan demikian, model ITS yang digunakan layak untuk digunakan dalam menjelaskan dinamika perubahan kemiskinan setelah adanya kebijakan bantuan sosial. Menurut Gujarati & Porter (2010), uji F penting untuk memastikan bahwa model regresi tidak hanya menjelaskan hubungan antarvariabel secara parsial, tetapi juga memberikan gambaran bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh nyata terhadap variabel terikat. Hal ini juga mendukung validitas model dalam penelitian empiris kebijakan ekonomi seperti evaluasi program sosial.

3.4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel-variabel independen yang terdapat dalam model mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Dengan kata lain, uji ini berfungsi untuk mengetahui tingkat *goodness of fit* dari model regresi yang digunakan dalam penelitian. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, maka semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam (Widarjono, 2018). Nilai R^2 berada pada rentang antara 0 hingga 1 ($0 < R^2 < 1$). Apabila nilai R^2 mendekati 0, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen sangat rendah atau terbatas. Sebaliknya, apabila nilai R^2 mendekati 1, maka sebagian besar variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model (Gujarati &

Porter, 2010). Dengan demikian, semakin besar nilai R^2 , semakin baik model tersebut dalam menggambarkan hubungan antarvariabel yang diteliti.

3.4.7 Interpretasi Hasil

Tahap terakhir dalam analisis adalah melakukan interpretasi terhadap hasil estimasi dan analisis dampak kebijakan. Interpretasi diarahkan pada:

1. Interpretasi variabel utama dalam model *Interrupted Time Series* (ITS) digunakan untuk menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan sebelum, ketika, dan setelah intervensi bantuan sosial PKH diterapkan di Provinsi Lampung. Koefisien β_1 menunjukkan tren tingkat kemiskinan sebelum intervensi bantuan sosial PKH. Koefisien β_2 menunjukkan perubahan level tingkat kemiskinan pada periode ketika intervensi diterapkan. Koefisien β_3 menunjukkan perubahan tren tingkat kemiskinan setelah intervensi. Tren setelah intervensi diperoleh dari penjumlahan $\beta_1 + \beta_3$. Apabila hasil $\beta_1 + \beta_3$ lebih negatif dibandingkan β_1 , maka menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang lebih besar serta cenderung menurun secara berkelanjutan setelah intervensi diterapkan.
2. Pengaruh variabel kontrol, seperti PDRB per kapita dan inflasi, dianalisis untuk melihat apakah faktor ekonomi makro turut mempengaruhi perubahan kemiskinan. Hal ini penting agar pengaruh bantuan sosial tidak terdistorsi oleh faktor eksternal lainnya.
3. Validitas model, dilihat dari hasil uji asumsi klasik dan signifikansi keseluruhan model. Model yang bebas dari pelanggaran asumsi dan memiliki koefisien signifikan dapat dijadikan dasar yang kuat untuk penarikan kesimpulan empiris.

Tahapan analisis ini, metode ITS tidak hanya menjawab rumusan masalah secara statistik, tetapi juga memberikan dasar ilmiah untuk menganalisis dampak setelah intervensi bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan. Hasil analisis dapat dijadikan referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung menggunakan metode *Interrupted Time Series* (ITS) dengan periode pengamatan tahun 2001-2024. Model penelitian memasukkan variabel tren waktu (T), variabel intervensi (X), tren waktu setelah intervensi (TA), serta variabel kontrol berupa PDRB per kapita dan inflasi. Berdasarkan hasil estimasi model dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil estimasi variabel (T) tren waktu sebelum intervensi menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa sebelum adanya PKH, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung telah mengalami penurunan secara bertahap dari waktu ke waktu.
2. Hasil estimasi variabel (X) dummy intervensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi PKH mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara langsung pada periode ketika bantuan sosial PKH diterapkan. Dengan demikian, program bantuan sosial ini terbukti berdampak dalam mengurangi tingkat kemiskinan dalam jangka pendek melalui peningkatan akses rumah tangga miskin terhadap bantuan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat melalui konsumsi.

3. Hasil estimasi variabel tren waktu setelah intervensi (TA) menunjukkan bahwa perubahan tren tingkat kemiskinan setelah implementasi PKH tidak signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan sejak adanya intervensi kebijakan PKH, tren penurunan kemiskinan dalam jangka panjang tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan tren sebelum implementasi program. Dengan kata lain, dampak PKH lebih terlihat dalam bentuk perubahan tingkat (*level change*) daripada perubahan tren jangka panjang (*slope change*).
4. Variabel kontrol PDRB per kapita terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi pendapatan masyarakat yang tercermin dalam peningkatan PDRB per kapita, maka semakin besar peluang masyarakat untuk keluar dari kondisi kemiskinan.
5. Variabel inflasi dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa fluktuasi tingkat harga selama periode penelitian tidak secara langsung memengaruhi perubahan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung setelah dikontrol bersama variabel intervensi kebijakan dan pertumbuhan ekonomi dalam model penelitian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan melalui perbaikan mekanisme penargetan penerima manfaat, transparansi penyaluran bantuan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi program. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat diterima oleh rumah tangga yang benar-benar membutuhkan.

2. Implementasi PKH perlu lebih diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan usaha mikro, serta program peningkatan produktivitas kerja. Integrasi ini penting agar rumah tangga penerima manfaat tidak hanya bergantung pada bantuan tunai, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mereka sehingga dapat benar-benar keluar dari kemiskinan.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Sehingga, pemerintah perlu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kenaikan PDRB riil per kapita dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap penurunan kemiskinan secara berkelanjutan..
4. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode pengamatan dengan frekuensi data yang lebih tinggi, seperti data triwulanan atau bulanan, sehingga dinamika perubahan tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah intervensi kebijakan dapat dianalisis secara lebih mendalam dan menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Selain itu, penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian, misalnya pada tingkat nasional di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan bantuan sosial dalam menurunkan kemiskinan. Penelitian selanjutnya juga dapat memfokuskan pada analisis perubahan tren pada suatu variabel objek penelitian dengan metode ITS. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi tingkat kemiskinan, seperti tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, ketimpangan pendapatan, maupun indeks pembangunan manusia (IPM), sehingga analisis yang dihasilkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi dinamika kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P., & Wahyuni, R. N. T. (2024). Dampak Kebijakan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Terhadap Ekspor Nikel Olahan Interrupted Time Series Analysis (Impact of Indonesia's Nickel Ore Export Ban on Processed Nickel Exports: Interrupted Time Series Analysis). *Seminar Nasional Official Statistics*, 173–182.
- Astuti, R. F. (2025). *Efektivitas Program Bantuan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Sendana Kota Palopo*. Iain Palopo. <https://repository.ia.inpalopo.ac.id/id/eprint/10588/>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil kemiskinan di Indonesia*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023a). *Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Indonesia 2019–2023*. BPS RI. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023b). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2023*. <https://www.bps.go.id/assets/publication/2023/11/30/8b8dac76525a92a21dc6568a/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-indonesia-tahun-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023c). *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Lampung 2019–2023*. BPS RI. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023d). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024a). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/ukvkwgjjvzfnwakl6vwxkvfqqwjjvwetlszdnabvfumdkjmw==/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi--2018.html?year=2024>
- Badan Pusat Statistik. (2024b). *Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Lampung Maret 2024 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu*. <https://pringsewu.kab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/02/1470/perkembangan-kemiskinan-di-provinsi-lampung-maret-2024.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024c). Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 10,69 persen, menurun 0,42 persen poin terhadap Maret 2023 dan me

nurun 0,75 persen poin terhadap September 2022. In *Badan Pusat Statistik*. <https://metrokota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/04/1445/the-percentage-of-poor-people-in-march-2024-was-10-69-percent--a-decrease-of-0-42-percentage-points-against-march-2023-and-a-decrease-of-0-75-percentage-points-against-september-2022-.html>

Badan Pusat Statistik. (2025a). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2025*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/30/bcc229ac31403d023f2d26a3/indikator-kesejahteraan-rakyat-2025.html>

Badan Pusat Statistik. (2025b). *Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS*. <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>

Badan Pusat Statistik. (2025c). *Persentase Penduduk Miskin - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung*. <https://lampung.bps.go.id/statistika/cstati/2/MzYjMg==/persentase-penduduk-miskin.html>

Badan Pusat Statistik. (2025d). *Persentase penduduk miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen*. BPS RI. <https://www.bps.go.id/pressrelease>

Bappenas. (2013). *Membangun Sistem Database Mdgs Dan Program Pembangunan* (3rd ed.). https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Buku_III_Sistem_Database_MDGs_dan_Program_Pembangunan.pdf

Bappenas. (2021). *Analisis Strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*. <https://komens.bappenas.go.id/kategori/detail/eyJpdii6ijhpoexnclj4eljxouvz zghznxjxtee9psisinzhhvlijoitllwqkhsrzgrbtb3rlnvcvj4smrdz09iwiwbfjjo imdu3zgvlnkxmdfiymq3zdzjnz00gi3mmexmdcwndmwytm5zmezodg3mty2ztq4zmmxztk0nwfmyjmyy2yxncisinrhzyi6iij9>

Bernal, J. L., Cummins, S., & Gasparrini, A. (2017). Interrupted time series regression for the evaluation of public health interventions: A tutorial. *International Journal of Epidemiology*, 46(1), 348–355. <https://doi.org/10.1093/ije/dyw098>

Bernal, J. L., Cummins, S., & Gasparrini, A. (2018). The use of controls in interrupted time series studies of public health interventions. *International Journal of Epidemiology*, July, 2082–2093. <https://doi.org/10.1093/ije/dyy135>

BPK RI. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. 1–23. https://peraturan.bpk.go.id/Download/147272/Permendagri_Nomor_14_Tahun_2016_.pdf

Calundu, R., & Musdalifa, M. (2023). Efektivitas Bantuan Jaminan Sosial Ekonomi

- Terhadap Kemandirian Masyarakat Prasejahtera di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 5(2), 321–332.
- Chen, J. (2025). *Understanding the Poverty Trap: Causes, Solutions, and Economic Impact*. Investopedia.Com. https://www.investopedia.com/terms/p/poverty-trap.asp?utm_sourcehttps://www.investopedia.com/terms/p/poverty-trap.asp?utm_source
- Chow, M. S. R. (2013). Determinants of Unemployment in Bangladesh: A Case Study. *Developing Country Studies*, 4(3).
- Dalimunthe, M. B., Sitanggang, B. E., & Panggabean, F. Y. (2022). The Relationship Between Economic Growth And Poverty In. *Journal of Social Sciences*, 5.
- Danil, M. (2018). Analysis of Coastal Community Consumption in Bireuen District. *Jurnal Kebangsaan*, 7(13), 49–59.
- Decta, L. P. (2013). Analisis Pengaruh Pad Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Jurnal Ilmiah Disusun Oleh : *Jurnal Ilmiah*, 1.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024). *Realisasi anggaran belanja bantuan sosial APBN pemerintah pusat tingkat wilayah Provinsi Lampung tahun 2015-2024*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/lampung/id/>
- Djulius, H., Lixian, X., Lestari, A. N., & Eryanto, S. F. (2022). The Impact of a Poor Family Assistance Program on Human Development in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 11(4), 59–70.
- Efendi, V. A., & Utami, Y. M. P. (2025). Implementasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Kesejahteraan Masyarakat di Desa Merak Batin. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(2).
- Emalia, Z., Budiarty, I., & Ratih, A. (2021). Pendampingan Kelompok Wanita Program Keluarga Harapan (PKH) Craft “ Wanita Mandiri ” di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(1), 45–54.
- Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023a). Pengaruh Bantuan Sosial BPNT dan PKH terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 45–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ED.V11I2.4654>
- Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023b). Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 24(1), 52–61. <https://www.academia.edu/download/103773992/2955.pdf>
- Fatmawati, F., & Preatin, P. (2022). Extreme poverty trap in Kalimantan barat. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 19(2), 32–41.

- Ferdiyansah, J., & Kriswibowo, A. (2023). Analisis Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai Dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan Di Kota Mo jokerto Tahun 2019-2021. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Pub lik*, 5, 341–347.
- Friska Olabu, Sri Endang Saleh, & Sri Indriyani Dai. (2024). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Har apan (PKH) Terhadap Kemiskinan. *Economic Reviews Journal*, 3(4), 1402–1419. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.470>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 26*. Badan penerbit universitas diponegoro.
- Greene, W. H. (2012). *Econometric Analysis (7th ed.)*. Pearson Education. http://www.mysmu.edu/faculty/zlyang/DSA305_2024T2Web/William_H_Gree ne-Econometric_Analysis-7th.pdf
- Gujarati, D., & Porter, D. C. (2010). *Dasar - Dasar Ekonometrika (5th ed.)*. Sale mba. <https://penerbitsalemba.com/buku/04-0043-dasardasar-ekonometri ka-1-e5>
- Hadna, A. H., & Askar, M. W. (2022). Indonesian Living Standards over 50 Years: A Multidimensional Analysis. *Asian Economic Journal*, 34(3), 249–274. <https://doi.org/10.1111/asej.12221>
- Haidir, A. A., & Setyari, N. P. W. (2024). Indonesia social progress: the role of access to basic education in escaping from poverty trap. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(2), 428–457. <https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.19810>
- Halawa, W. (2023). *Analisis Efektivitas Bantuan Sosial dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan*. 1–10.
- Halimah, U. N., Wullandari, M., Rivaldo, A. D., & Noviarita, H. (2024). Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis (JOSSAMA)*, 1(4), 31–51. <https://jossama.com>
- Haritsah, N. I. M. (2024). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, Pengangguran, Inflasi, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemi skinan Di Provinsi Jawa Timur*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hategeka, C., Ruton, H., Karamouzian, M., Lynd, L. D., & Law, M. R. (2020). Use of interrupted time series methods in the evaluation of health system quality improvement interventions: A methodological systematic review. *BMJ Global Health*, 5(10), 1–13. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003567>
- Herlambang, M. F., Pratiwi, R., Zain, N., Ria, R., Hasibuan, A., Islam, U., & Su matera, N. (2026). Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIP M)*, 4(2), 1–11.

- Hidayat, S., & Woyanti, N. (2021). Pengaruh PDRB per kapita, belanja daerah, rasio ketergantungan, kemiskinan, dan teknologi terhadap ipm di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 23(4), 122–137.
- Huda, R. A., Ade Puspita, R., Hasanah, S. N., Malik, A., Syariah, P. E., Raden, U., & Lampung, I. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang. No ranking found for “Kalianda Halok Gagas.” *Ojs.Umkal.Ac.Id*, 8(1), 48–65. <https://doi.org/10.52655/KHG.V8I1.106>
- Ilboudo, P. G., & Siri, A. (2023). Effects of the free healthcare policy on maternal and child health in Burkina Faso : a nationwide evaluation using interrupted time-series analysis. *Biomed Central*, 1–13.
- J, U. S., & Salma, A. (2025). Analysis of The Effect of Unemployment , Economic Growth and Inflation on Poverty in West Sumatra Province. *Journal Of Statistics And Data Science*, 1, 9–16.
- Jdih.lampungprov. (2011). *Keputusan Gubernur No. 82 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung Tahun 2011*. <https://jdih.lampungprov.go.id/product-hukum/provinsi/8334/download/artikel-hukum>
- Jiang, H., Tran, A., Lange, S., Health, M., Street, U. F., Health, M., & Building, M. S. (2024). *Interrupted Time Series Design and Analyses in Health Policy Assessment*. 1–16.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Kajian Fiskial Regional Provinsi Lampung*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. <https://kemensos.go.id/unduh/buku/pedoman-pelaksanaan-program-keluarga-harapan-tahun-2021>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Program Keluarga Harapan*. https://kemensos.go.id/program-bantuan-sosial/pkh?utm_source
- Keynes, J. M. (1936). 6.11 2 Keynes. The General Theory of Employment. *The General Theory of Employment, Interest and Money*, 263. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=su1ldwaaqbaj&oi=fnd&pg=pr7&ots=drwv-hilto&sig=ksplx7pmhathzjdjuc9t7fucy77m>
- Khomsan, A., Dharmawan, A. H., Sukandar, D., & Syarief, H. (2015). *Indikator kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=idzddaaaqbaj&oi=fnd&pg=pa1&dq=indikator+kemiskinan+dan+misklasifikasi+orang+miskinin&ots=afnxez-mJK&sig=iYmXX97gPuOX91k3peU0gsjflexU&redir_esc=

y#v=onepage&q=Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Misk
in&f=

- Kontopantelis, E., Doran, T., Springate, D. A., Buchan, I., & Reeves, D. (2015). Regression based quasi-experimental approach when randomisation is not an option: Interrupted time series analysis. *BMJ (Online)*, *350*, h2750. <https://doi.org/10.1136/bmj.h2750>
- Langbein, L., & Felbinger, C. L. (2012). *Public Program Evaluation* (1st&2nd ed.). M.E. Sharpe.
- Langoday, T. O. (2024). The effect of use-side gross domestic product on poverty level achievement in Indonesia. *Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics*, *42(2)*, 361–379. <https://doi.org/10.18045/zbefri.2024.2.4>
- Linden, A. (2015). Conducting interrupted time-series analysis for single- and multiple-group comparisons. *Stata Journal*, *15(2)*, 480–500. <https://doi.org/10.1177/1536867x1501500208>
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, *9(2)*, 88–99. https://scholar.google.com/scholar?cluster=2951638370950596622&hl=id&as_sdt=2005&scioldt=0,5
- Manalu, S. P. R., Lubis, H., Nasution, A. H., Pakpahan, E., Hajatina, H., & Bukit, A. N. (2024). Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB, PDRB Per Kapita, Dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2022. *Value*, *4(2)*, 237–253. <https://doi.org/10.36490/value.v4i2.1065>
- Mankiw, N. G. (2019). *Macroeconomics* (10th ed.). Worth Publishers. https://books.google.co.id/books/about/Macroeconomics.html?id=B-eFtwEACAAJ&redir_esc=y
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics (9th ed.)*. <https://faculty.cengage.com/works/9780357038314>
- Millán, T. M., Barham, T., Macours, K., Maluccio, J. A., & Stampini, M. (2019). Long-term impacts of conditional cash transfers: Review of the evidence. *World Bank Research Observer*, *34(1)*, 119–159. <https://doi.org/10.1093/wbro/lky005>
- Miščikienė, L., Jiang, H., Tran, A., Rehm, J., Štelemėkas, M., & Lange, S. (2025). The impact of alcohol control policy on assaults and sexual assaults in Lithuania: An interrupted time-series analysis. *Public Health*, *242*(March), 319–323. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2025.03.027>
- Mursyidah, L. (2023). Efektivitas Program Bantuan Tunai Bersyarat Mengatasi Kemiskinan dan Kelaparan. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, *5(2)*, 188–200.

- Murwiati, A. (2023). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto , Keluarga Penerima Manfaat , dan Inflasi Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Di Indonesia Dengan Regresi Kuantil. *Journal Of Social Science Research*, 3, 8 631–8643.
- Nelson, R. R. (1956). A theory of the low-level equilibrium trap in underdeveloped economies. *The American Economic Review*, 46(5), 894–908.
- Nurkse, R. (1953). *Problems of capital formation in underdeveloped countries*.
- Penfold, R. (2023). *Introduction to Interrupted Time Series Analysis*. Washington, DC.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan* (pp. 1–35).
- Ppid.lampungprov.go.id. (2023). *Tingkatkan Sinergitas, Dinsos Lampung Gelar Rakor Bersama Korwil dan Korkap PKH se-Lampung*. Ppid.Lampungprov.Go.Id. <https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Tingkatkan-Sinergitas-Dinsos-Lampung-Gelar-Rakor-Bersama-Korwil-dan-Korkap-PKH-se-Lampung>
- Prasaja, M. (2013). Pengaruh investasi asing, jumlah penduduk, dan inflasi terhadap pengangguran terdidik di Jawa Tengah periode tahun 1980-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3).
- Prasiska, D. I., & Yoon, S. (2021). Does the Implementation of Regulation Affect COVID-19 Transmissibility and Mortality? Lessons Learned from Nganjuk Regency. *Jurnal Promkes*, 9(2), 115. <https://doi.org/10.20473/jpk.v9.i2.2021.115-124>
- Rahman, A., & Alamsyah, M. F. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Konsumsi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Migran Di Kota Makassar. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(1), 111. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i1.9546>
- Ratih, A., Gunarto, T., & Murwiati, A. (2023). from Monetary Poverty in Lampung Province ? *International Conference of Economics, Business, and Entrepreneur, 2010*, 202–208. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-064-0>
- Razali, N. M., & Wah, Y. (2011). *Power comparisons of Shapiro-Wilk , Kolmogorov-Smirnov , Lilliefors and Anderson-Darling tests*. https://www.nbi.dk/~petersen/Teaching/Stat2017/Power_Comparisons_of_Shapiro-Wilk_Kolmogorov-Smirn.pdf
- Resina, D., Kamarni, N., Putra, F. P., & Naskah, I. (2022). Program Keluarga Harapan : Can It Reduce Poverty and Increase Welfare in Indonesia ? Household Level Evidence from Districts / Cities in Indonesia on 2019. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*. <https://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php>

p/jep/article/view/530/245

- Rintia, R., Sentosa, I., & Yudithia, Y. (2025). Evaluation of the Ministry of Social Affairs Policy on Social Protection Programs in Indonesia. *Journal Governance Society*, 2(1), 24–37.
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024a). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317>
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024b). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill Education.
- Shahidi, F. V, Ramraj, C., Sod-erdene, O., Hildebrand, V., & Siddiqi, A. (2019). The impact of social assistance programs on population health : a systematic review of research in high-income countries. *Biomed Central*, 1–11.
- Sinaga, E., Lubis, T. A., Andy, E., Situmorang, O., Harahap, A. S., Perbendaharaan, D. J., Keuangan, K., & Korespondensi, A. (2022). Dampak Program Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan di Sumatra Utara. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(2), 116–131. <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i2.416>
- Sri Wahyuni, W., & Prima Putra, F. (2025). Analisis Karakteristik Rumah Tangga Miskin Penerima Program Keluarga Harapan dan Penerima Keluarga Harapan Sekaligus Bantuan Pangan Non-Tunai di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 141–147. <https://doi.org/10.37034/inf.v7i2.1112>
- Sujoko, A., Perencanaan, B., Daerah, P., Tulungagung, K., & Prawitasari, A. I. (2022). Evaluasi Dampak terhadap Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Tulungagung Impact Evaluation of Local Government Regulation on Protection and Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprise. *Jurnal Analisis Kebijakan* |, 6(2), 1.
- Sukirno, S. (2011). Makro ekonomi teori pengantar edisi ketiga. *Rajawali Pers, Jakarta*, 90.
- Sumiyarti. (2022). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Srikandi: Journal of Islamic Economic and Banking*, 1(1), 28–43. <https://doi.org/10.25217/srikan.div1i1.1335>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Yumna, A. (2021). The Impact of Covid-19 and Social Protection Programs on Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(3), 267–296. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2005519>

- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271–278.
- Syahwanes, A., Saepudin, E., ... L. M.-E. J., & 2025, U. (2025). Dampak PKH Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin. Analisis Mencakup Efektivitas Pemberian Bantuan *Indojurnal.Com*. <http://indojurnal.com/index.php/ekopedia/article/view/123>
- Syata, W. M. (2025). Efektivitas program bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 554–559.
- Thyer, B. A. (2012). *Quasi-Experimental Research Designs* (Issue October). <https://doi.org/10.1093/acprof>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (12th edisi). *Essex Pearson Education Limited*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development (13th ed.)*. <https://studylib.net/doc/28253401/979690822-economic-development-13th-edisi-on-michael-p-todaro>
- Tropical, M. R. C., Group, E., & Medicine, T. (2019). Analysing Interrupted Time Series with a Control 1. *De Gruyter*, 1–10. <https://doi.org/10.1515/em-2018-0010>
- Turner, S. L., Forbes, A. B., Karahalios, A., Taljaard, M., & McKenzie, J. E. (2021). Evaluation of statistical methods used in the analysis of interrupted time series studies : a simulation study. *BMC Medical Research Methodology*, 0, 1–18.
- Turner, S. L., Karahalios, A., Forbes, A. B., Taljaard, M., Grimshaw, J. M., Cheng, A. C., Bero, L., & McKenzie, J. E. (2019). Design characteristics and statistical methods used in interrupted time series studies evaluating public health interventions: Protocol for a review. *BMJ Open*, 9(1). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-024096>
- Turner, S. L., Korevaar, E., Karahalios, A., Forbes, A. B., & McKenzie, J. E. (2025). Interrupted time series datasets from studies investigating the impact of interventions or exposures in public health and social science: a data note. *BMC Research Notes*, 18(1), 32. <https://doi.org/10.1186/s13104-024-07055-5>
- Ulinuha, P., A, H. H., Sulthoni, M., Setiawan, D., & Anas, A. (2024). *Government Efforts In Overcoming Extreme Poverty : Case Study Of Bojong Village , Wangandowo*. 981–990. <https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icie/article/download/1701/1365>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40787>

- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. Bpk Ri. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*.
- UNDP. (2023). Human Development REPORT 2023 / 2024 Reimagining cooperation in a polarized world. In *European Union (EU). (2024). EU Missions and Operation*.
- Uyun, S. I., Wijaya, R. S., & Perdana, P. (2025). Analysis of the Effect of Per Capita GRDP , Education , Income Inequality and Investment on Poverty in Urban Areas in East Java Province. *International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE)*, 4(4), 1743–1758.
- Waluyo, B., & Khoirunurrofik. (2021). Hubungan Program Keluarga Harapan (Pkh) dengan Tingkat Kemiskinan di Daerah Tertinggal dan Non Tertinggal di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2021), 361–373.
- Wati, E. J., Sari, M. I., Hidayattullah, Y., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, B. (2025). Dampak Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Indonesia : Tinjauan Literatur Dampak Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Indonesia : Tinjauan Literatur. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(11).
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika edisi keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YK PN.
- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory econometrics a modern approach*. South-Western cengage learning.
- World Bank. (2020a). *Indonesia Protecting the Poor and Vulnerable*. <https://www.worldbank.org/en/news/video/2020/05/20/indonesia-protecting-the-poor-and-vulnerable>
- World Bank. (2020b). *Poverty and shared prosperity 2020: Reversals of fortune*. World Bank.
- World Bank. (2020c). *Social Assistance Programs and Poverty Reduction in Developing Countries and The Atlas of Social Protection - Indicators of Resilience and Equity*. World Bank. <https://www.worldbank.org>
- Yanti, D. F., & Adi, I. R. (2021). Analisis Process Terhadap Strategi Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Cianjur Dalam Kerangka Result-Based Management. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(2), 146–163. <https://doi.org/10.15408/empati.v9i2.18133>